

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Singkat Kota Batu

Kota Batu, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri/Jombang. Kota Batu berbatasan dengan beberapa kabupaten; Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, serta di sebelah timur, selatan, dan barat, berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai kawasan wisata, pegunungan yang sejuk, kota ini banyak terdapat villa serta sejumlah hotel berbintang. Serta memiliki beberapa tempat wisata andalan, antara lain : Jatim Park, Agrowisata Perkebunan Apel, Songgoriti, dan Pemandian Selecta. Jatim Park merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Jawa Timur. Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga mendapat julukan Kota Agropolitan. Seperti halnya kawasan Malang dan sekitarnya, Batu banyak menghasilkan apel, jeruk dan sayur-sayuran seperti bawang putih, bawang merah, wortel, sawi, brokoli dan lain sebagainya.

Batu tumbuh sebagai kawasan hunian seiring masuknya perkebunan kolonial pada pertengahan abad ke-19 di Jawa Timur. Batu dulunya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, kemudian statusnya ditingkatkan sebagai kota administratif. Pada tanggal 6 Maret 1993 Kota administrasi Batu dibentuk dan diresmikan (sebelumnya merupakan kecamatan bagian wilayah Kabupaten Malang). Pada tanggal 10 April 1995, Surat persetujuan DPRD Kab. Malang dan bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Kemudian pengusulan kepada gubernur tentang peningkatan status kotif menjadi kotamadya di ajukan pada tanggal 11 April 1995.

Pada tanggal 6 Juni 1996 Dengan persetujuan DPRD kota Malang dan surat bupati Malang disertai Surat Pembantu Gubernur di Malang, Batu mengusulkan peningkatan status dari Kotif menjadi kotamadya ke gubernur Jawa Timur. Pada tanggal 12 Januari 2001 Melalui proses yang panjang, maka

setelah pemilu 1999 terbit Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia tentang penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pada tanggal 28 Februari 2001 dikeluarkanlah keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Dan perkembangan dari proses pembentukan kota Batu terealisasi pada tanggal 21 Juni 2001, bawasanya Kota Batu diresmikan menjadi Kota, berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai “ Hari Jadi “ kota Batu, Seiring pesatnya perkembangan perekonomian kota Batu. Pada waktu itu Wali Kota yang pertama dan kini sudah lengser dari jabatannya sebagai pemimpin kota Batu adalah Drs. Imam Kabul, M.Si yang digantikan setelah wafat sebelum masa kepemimpinannya habis oleh Drs. Eddy Rumpoko, M.Si. Meski sudah delapan tahun Kota Batu memisahkan diri dari Kabupaten Malang, masih banyak orang menyebut Kota Batu sebagai bagian dari Kota Malang. Padahal, Kota Batu dan Kota Malang sekarang sudah sejajar, sama-sama berbentuk Pemerintah Kota.

b. Keadaan Geografis

Secara geografis kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang terletak pada posisi antara $7^{\circ} 44' 55,11''$ s/d $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang Selatan $122^{\circ} 17' 10,90''$ s/d $122^{\circ} 57' 00,00''$ Bujur Timur

Kota Batu dengan luas $202,800 \text{ Km}^2$ atau 20,280 Ha ini, letak wilayah pemerintahannya secara garis besar berada di tengah-tengah Pemerintahan Kabupaten Malang dan sebagian kecil berbatasan langsung dengan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, batas wilayah Pemerintahan Kota Batu sebagai berikut :

- 1) Sebelah selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang
- 2) Sebelah barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau
Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan
Kabupaten Malang

Pembagian wilayah kota batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan, 226 RW, dan 1052 RT. Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km² terdiri dari desa Ngaglik, Oro-oroo Ombo, Pesanggrahan, Sidomulyo, Sisir, Songgokerto, Sumberejo, dan Temas. Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km² terdiri dari Desa Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, Sumbergondo dan Tulungrejo. Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km² terdiri dari : Desa Beji, Dadaprejo, Junrejo, Mojorejo, Pendem, Tlengkung, dan torongrejo. Adapun luas wilayah Pemerintahan Kota Batu meenurut tabel sebagai berikut :

Tabel : 2

Komposisi luas wilayah Pemerintah Kota Batu di rinci menurut keadaan kecamatan tahun 2007

Wilayah	LUAS (Km²)	%
Kecamatan Batu	46.377	22.67
Kecamatan Bumiaji	130.189	64.20
Kecamatan Junrejo	26.234	12.93
JUMLAH	202.800	100

Sumber data : Registrasi Penduduk BPS Kota Batu Tahun 2007

c. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Jika dilihat Keadaan Topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 - 3000m dari permukaan laut.

Keadaan Klimotografi Kota Batu memmiliki suhu minimum 24 - 18°C dan suhu maksimum 32-28°C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% dan curah hujan rata-rata 875-3000mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman holtikultura dan ternak.

d. Pola Penggunaan Tanah

Berdasarkan Pola Penggunaan tanah di Kota Batu secara keseluruhan masih di dominasi keberadaan kawasan terbangun (Pemukiman dan sarana serta Prasaranan pendukungnya) yaitu \pm 1.749.9233 Ha atau 8,6% dari luas keseluruhan Kota Batu. Sedangkan sisanya merupakan kawasan non terbangun yaitu (tata guna tanah terdiri dari) : - Pemukiman = 1.568.757 Ha - Sawah Irigasi = 2.525.351 Ha - Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha - Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha - Hutan = 6.576.459 Ha – Kebun = 1.029.887 Ha - Semak/Belukar = 2.930.547 Ha - Lain-lain = 181.166 Ha. Secara terperinci keadaan tata guna tanah disajikan pada tabel berikut :

Tabel : 3
Pemanfaatan/ Tata Guna Tanah Kota Batu

No	LAHAN	Luas (Ha)	%
1	Pemukiman	1.568.757	7,73
2	Sawah Irigasi	2.525.351	12,45
3	Sawah Tadah Hujan	95.009	0,47
4	Tegal/ Pekarangan	5.378.324	26,51
5	Kebun	1.029.887	5,06
6	Hutan	6.576.459	32,42
7	Semak/ Belukar	2.930.547	14,45
9	Lain-lain	181.160	0,89
10	Luas Kota Batu	20.284.500	100

Sumber Data : Monografi Pemerintahan Kecamatan Batu Tahun 2007

e. Kependudukan

Sepintas gambaran dari data Jumlah Penduduk Kota Batu terdiri dari 170.192 jiwa terdiri dari laki-laki 83.145 jiwa dan wanita 83.803 jiwa, dan jumlah kk 43.336 kk. Kewarganegaraan :WNI 166.887 jiwa dan WNA 66 jiwa. mutasi Penduduk :Lahir 2.688 jiwa, Mati 1.020 jiwa, pindah 1.625 jiwa dan yang datang 3.135 jiwa. Secara lebih terperinci Jumlah penduduk Kota Batu disajikan pada tabel berikut :

Tabel : 4
Data Kependudukan Kota Batu Menurut Status Kewarganaegaraan Bulan
Juli 2008

PENDUDUK AWAL			LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH			PENDUDUK AKHIR		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
83145	83803	16695	974	1.174	2.688	421	599	1.020	1.264	1.871	3.135	763	862	1.625	84.199	85.927	171.026
45	21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	21	66
83.190	83.824	16.761	974	1.714	2.688	421	599	1.020	1.265	1.871	3.135	763	862	1.625	84.244	85.948	170.192

Sumber : Kantor Kecamatan Batu, Bulan Juli 2008

Bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun, sementara di saat yang sama luas wilayah tidak berubah, maka angka kepadatan penduduk akan terus bergerak naik. Dari data tabel kependudukan Kota Batu diatas menunjukkan bahwa ada perubahan jumlah penduduk yakni dari tahun sebelumnya hingga tahun 2008 terdapat penambahan jumlah penduduk yang menetap di Kota Batu. Perubahan peningkatan jumlah penduduk ini terdiri dari beberapa indikator utama, yakni angka kelahiran, angka kematian, penduduk yang datang dan penduduk yang pindah dari kota batu. Dengan tercatatnya data penduduk seperti tertera dalam data tabel diatas, bertujuan untuk pencatatan status yang lebih terperinci dalam status kelayakan sosial ekonomi yang ada pada masyarakat Kota Batu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai letak kota Batu beserta gambaran luas wilayah, berikut dapat dilihat pada gambar peta Kota batu dibawah ini.

Gambar. 3
Peta Kota Batu



f. Visi dan Misi Kota Batu

1) Visi Kota Batu

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kearah dimana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Hakekat visi Kota Batu adalah gambaran secara proyektif dan rasional tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan Kota Batu, maka melalui proses penggalangan aspirasi masyarakat, ditetapkan visi Kota Batu adalah “Batu, Sentra Pertanian, Pariwisata dan Pendidikan Ditopang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Budaya yang Didayagunakan Secara Optimal, Terkendali Dengan Pemerintahan Kreatif Inovatif Bersih Bagi Seluruh Rakyat”.

Panca Manggala Kota Batu

- a) Target Kota Batu ke depan : Sentra pertanian, wisata, pendidikan
- b) Unsur penopang pencapaian target : SDM, SDA dan SDB
- c) Pendayagunaan unsur penopang : Optimal – Terkendali
- d) Pengelolaan Pemerintahan : Kreatif – Inovatif – Bersih
- e) Khalayak sasaran : Keseluruhan Warga Kota Batu

2) Misi Kota Batu

Misi pembangunan Kota Batu yang telah ditetapkan melalui proses penggalangan aspirasi masyarakat adalah meliputi :

- a) Mendayagunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal dan terkendali sebagai unsur internal pengembangan Kota Mandiri.
- b) Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan swasta asing sebagai unsur eksternal untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif.
- c) Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankan roda Pemerintah Daerah secara kreatif, inovatif dan bersih dari KKN guna mengoptimalkan pelayanan publik.
- d) Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari:
 - Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian
 - Kota Wisata menjadi Sentra Wisata

- Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan, secara bertahap dan berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra Pendidikan Pertanian.
- e) Akselerasi pembangunan sektor fisik
- f) Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan mngedepankan keseimbangan ekosistem.
- g) Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari azas toleransi.
- h) Menciptakan kehidupan politik demokratis.

g. Tujuan Pembangunan Kota Batu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sebab, pada hakekatnya tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga berguna untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi.

Adapun tujuan Pembangunan Daerah Kota Batu adalah sebagai Berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama dengan didukung masyarakat yang madani;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menghadapi globalisasi dan mengelola sumber daya alam;
- 3) Meningkatkan dunia usaha melalui kemitraan usaha ekonomi lemah dengan dunia usaha pariwisata dan pertanian dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan;
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan dan kemudahan akan prasarana dan sarana;
- 5) Meningkatkan kesadaran demokrasi serta penegakan hukum di kalangan masyarakat dan Aparatur Pemerintah.

Sebagaimana tujuan, hubungannya dengan visi misi organisasi, sasaran berfungsi untuk mempertajam, menjelaskan dan bahkan mengarahkan kejelasan-kejelasan tersebut pada kuantitatif pengukuran antas pencapaian kinerja pelaksanaan kehiatan-kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan jabaran lebih rinci dan konkrit dari tujuan



Dari gambar bagan struktur Pemerintahan Kota Batu diatas menunjukkan bahwa terdapat organisasi unsur pelaksana dan lembaga teknis daerah didalam ke pemerintahannya. Unsur pelaksana dalam hal ini adalah dinas-dinas daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Adapun dinas-dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendapatan
4. Dinas Pemukiman dan Bina Marga
5. Dinas Pengairan dan Sumber Daya Mineral
6. Dinas Kebersihan dan Pertanaman
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Pertanian
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
11. Dinas Infokom dan Perpustakaan
12. Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Capil

Sedangkan lembaga teknis disebut sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, lembaga teknis yang dimiliki pemerintah Kota Batu antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan
2. Badan Pengawas
3. Badan Kesbang dan Linmas
4. Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial
5. Kantor Koperasi dan UKM
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
7. Kantor Kas Daerah

Dari keseluruhan aparatur pemerintahan kota yang tersebut diatas memiliki fungsi dan tanggung jawab penuh terhadap kepala pemerintahan yakni Walikota. Tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, berkaitan dengan segala kemajuan pembangunan daerah yang intinya sebagai perwujudan di era otonomi daerah.

h. Dinas Pendapatan Daerah

1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dalam menyusun rencana strategi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan visi organisasi. Tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis dan memiliki orientasi terhadap masa depan.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga selama kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang tersebut.

Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi dalam hal instansi pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pembangunan, maka Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki visi, yaitu : ” Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Dan Pelayanan Prima Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas ”

2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Setiap organisasi/ instansi pemerintah memastikan agar visinya sesuai dan selaras dengan perubahan dan tuntutan jaman, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian misi.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Guna mewujudkan misi tersebut, Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan misi sebagai berikut :

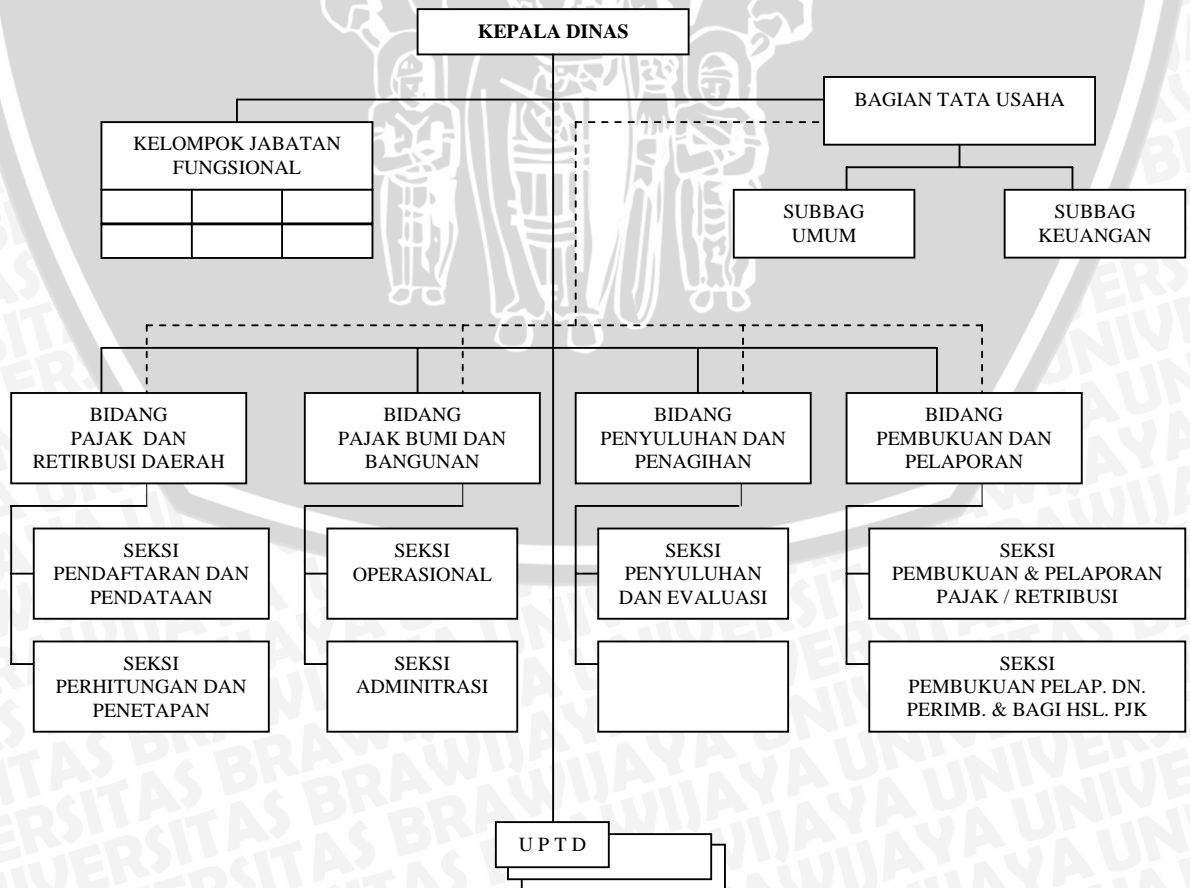
- a) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b) Perbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d) Meningkatkan tertib administrasi dan pemutakhiran data.

3) Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

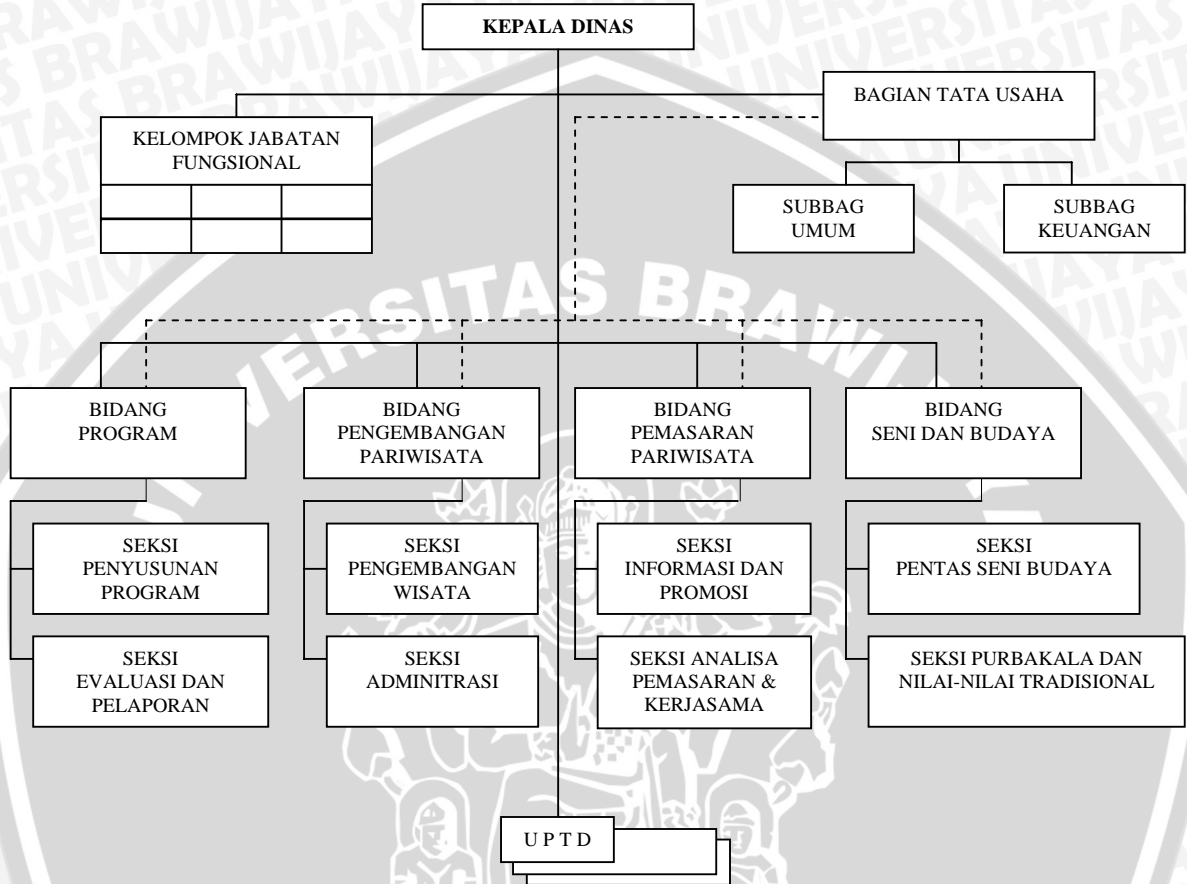
- a) Pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan dibidang pendapatan Daerah;
- b) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c) Penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah;
- e) Pelaksanaan pelatihan bidang pendapatan Daerah;
- f) Pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta pendapatan lainnya;

Gambar. 5

**GAMBAR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KOTA BATU**



Gambar. 6
GAMBAR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KOTA BATU



Sumber : Monografi Pemerintahan Kelurahan Sisir Tahun 2008

i. Kelurahan/ Desa Sisir

Adapun luas wilayah Kelurahan /Desa Sisir; 8,545 Km², dengan data Orbitrase Kelurahan Sisir; Jarak ke Pemerintahan Kota Batu 1,5 Km, jarak ke Kecamatan Batu 0,8 Km, jarak ke Propinsi 75 Km.

Adapun batas wilayah Kelurahan Desa Sisir :

- 1) Utara : Desa Sidomulyo, dan Desa Pandanrejo
- 2) Selatan : Desa Pandanrejo, dan Kelurahan Temas
- 3) Timur : Kelurahan Temas, dan Desa Oro-oro ombo
- 4) Barat : Kelurahan Ngaglik, dan Desa Sumberejo

Berdasarkan hasil penelitian dengan observasi di lapangan yang dilakukan oleh penulis, bawasanya masyarakat desa Sisir memiliki jenis pekerjaan yang

beragam dengan jumlah yang berbeda. Masyarakat desa Sisir ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, selain pemukiman yang terletak di tengah kota Batu, fasilitas pelayanan umum yang tersedia bisa dikatakan cukup memadai. Masyarakat hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk berbelanja di pasar tradisional, pergi ke sekolah, hingga ke rumah sakit umum. Selain itu ada fasilitas angkutan umum yang dapat dipilih selain kendaraan pribadi, yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Sisir untuk mencapai beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Sisir mulai kendaraan yang menggunakan tenaga hewan untuk menjalankannya, (Dokar) hingga angkutan kota sebagai pilihan utama. Sarana dan prasarana jalan pun sudah sangat memadai, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya jalan yang berada di desa Sisir sudah semuanya yang beraspal sehingga angkutan kota pun dapat melaluinya hingga dapat melayani keperluan perjalanan masyarakat desa sampai ke pelosok dan desa-desa di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Desa Sisir.

a) Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada bulan Juli tahun 2008, Jumlah penduduk Kelurahan Sisir mencapai sebanyak 17.862 jiwa. Dilihat dari komposisi jenis kelamin, maka jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.909 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.953 jiwa. Tidak seperti umumnya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat, di Kelurahan Sisir menunjukkan gejala yang berbeda, yaitu penurunan jumlah penduduk. Selama dua tahun (2006-2008) terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 2.243 jiwa.

Tabel : 5

Data Kependudukan Kelurahan Sisir Bulan Juli 2008

PENDUDUK AWAL			LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH			PENDUDUK AKHIR		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
8.882	8.936	17.818	7	9	16	7	3	10	18	18	36	24	22	46	8.876	8.938	17.814
33	15	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	15	48
8.915	8.951	17.866	7	9	16	7	3	10	18	18	36	24	22	46	8.909	8.953	17.862

Sumber : Kantor Kelurahan Sisir – Batu

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk desa Sisir yang tercatat kelurahan sisir pada bulan Juli 2008, dihuni oleh 17.862 jiwa. Dengan jumlah WNI sebanyak 17.814 jiwa dan jumlah WNA sebanyak 48 jiwa. Dimana dapat diklasifikasikan antara jumlah WNI laki-laki sebanyak 8.882 jiwa, dan WNA laki-laki sebanyak 33 jiwa, sedangkan WNI perempuan sebanyak 8.936 jiwa dan WNA perempuan sebanyak 15 jiwa.

Jumlah penduduk WNI laki-laki yang lahir 7 jiwa dan perempuan 9 jiwa, total keseluruhan penduduk yang lahir sebanyak 16 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk WNI yang meninggal dunia laki-laki 7 jiwa dan perempuan 3 jiwa, total penduduk yang meninggal dunia sebanyak 10 jiwa. Sedangkan penduduk WNA tidak terdapat penambahan angka kelahiran maupun kematian. Kemudian ada penduduk pendatang yang datang ke desa Sisir, laki-laki 18 jiwa dan perempuan 18 jiwa maka total penduduk pendatang sebanyak 36 jiwa. Sedangkan berpindah tempat tinggal dari desa Sisir, laki-laki 24 jiwa dan perempuan 22 jiwa maka total penduduk yang berpindah tempat sebanyak 46 jiwa.

Berkaitan dengan data kependudukan yang tercatat oleh Kelurahan Sisir, Kelurahan Sisir memiliki wadah berupa beberapa jenis usaha dalam upaya memfasilitasi warganya, berikut merupakan data laporan jenis usaha yang berada di Kelurahan Sisir

Tabel : 6

Data Jenis Usaha Kelurahan Sisir Bulan Juli 2008

NO	JENIS USAHA	PEMILIK / PENGURUS	LOKASI
1	Gedung Graha Wangsa	Bpk. M. Agus Harianto	Jl Semeru
2	Bumkel	Bpk. Ir Arifin	Jl. Imam Bonjol
3	Kerajinan Batik	Bpk. Iwan	Jl. Imam Bonjol
4	APE	Bpk. Irvan	Jl. Arjuno
5	Pasar Sore	Bpk. Suhadi	Jl. Sudiro
6	Pasar Minggu	Bpk. Hari	Jl. Sudiro
7	Pasar Hewan	Bpk. Slamet	Jl. Dorowati

Sumber : Kantor Kelurahan Sisir – Batu, Bulan Juli 2008

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa desa Sisir juga sudah terdapat berbagai jenis usaha, usaha-usaha tersebut dikelola oleh pihak Kelurahan Sisir,

dan ada beberapa jenis usaha yang dimiliki serta dikelola penduduk yang ada di Desa Sisir, dengan keberadaan usaha tersebut merupakan bukti berjalannya dan berkembangnya roda perekonomian di Kelurahan Sisir.

j. Kusuma Agrowisata

1) Gambaran Umum

Kusuma Agrowisata terletak dikawasan kota Administratif Batu, tepatnya dilereng bukit Panderman, ± 90 Km dari kota Surabaya, ± 10 Km dari kota Malang, dan ± 2 Km dari Kota Batu. Letak Kusuma Agrowisata tepatnya di jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu.

Adapun batas – batas wilayah kawasan Kusuma Agrowisata yaitu :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sisir.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sanggrahan.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan gunung Panderman.
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Ngaglik.

Kawasan Kusuma Agrowisata terletak pada ketinggian ± 1000 M diatas permukaan laut, dengan struktur tanah latosol dengan luas kebun 15 Ha.

Adapun keadaan iklim di kawasan Kusuma Agrowisata adalah :

- a) Suhu udara rata –rata : $17^{\circ} - 24^{\circ}$ C.
- b) Curah hujan : 1256 mm/ th.
- c) Kelembaban Udara : Udara kering 3 - 4 bulan
Udara basah 8 - 9 bulan

Di Kusuma Agrowisata selain memasarkan buah Apel dan Jeruk, serta penginapan sebagai komoditi utama, Kusuma Agrowisata juga menawarkan produk yang lain seperti ;

- a) Jenang dan Wingko Apel.
- b) Sari Buah Apel, Jeruk, Strawberry Dan Sirsat.
- c) Cuka Apel dan Kopi
- d) Tanaman Hias
- e) Makanan dari kedai apel

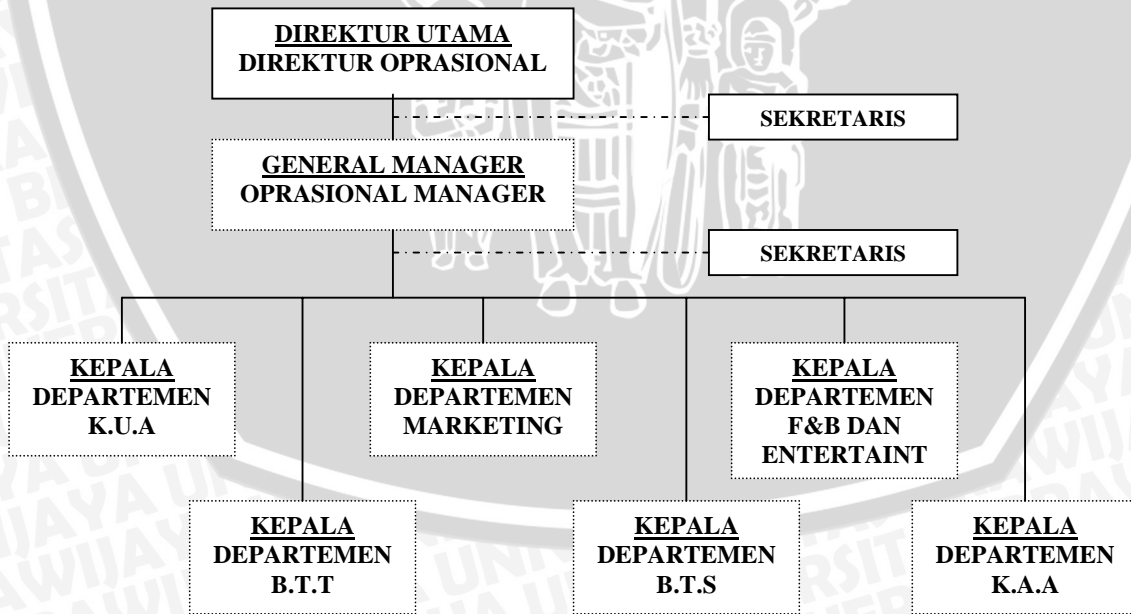
(1) Fasilitas yang Tersedia

Kusuma Agrowisata memiliki tiga macam perkebunan yaitu; kebun apel, kebun jeruk, dan kebun strawberry, selain itu juga terdapat bibit apel dan jeruk, serta stan pedagang yang berjualan tanaman hias. Bagi pengunjung yang ingin berkeliling kebun atau areal Kusuma Agrowisata, juga disediakan transportasi kuda atau mobil wisata, bagi pengunjung yang gemar memancing juga disediakan kolam pancing ikan untuk memancing. Didalam areal kebun juga disediakan tempat untuk bersantai, sebuah restoran yang dinamakan *Apel House*, dimana menyediakan aneka ragam menu masakan dan minuman khas yang terbuat dari sari apel dan jeruk, selain itu juga terdapat industri pengolahan Apel, jeruk dan Strawberry menjadi produk minuman sari apel dan jenang apel. Kemudian diluar areal perkebunan Kusuma agro, juga terdapat penginapan yang berupa Hotel dan *Cotagge* bagi pengunjung yang ingin menginap atau bermalam sambil menikmati keindahan alam.

(2) Struktur Organisasi Kusuma Agrowisata

Gambar : 7

Gambar Struktur Organisasi Kusuma Agrowisata



Sumber Data : PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya Tahun 2008

Dalam penelitian ini penulis akan membahas dalam skop satu departemen saja dan menjabarkan lebih lanjut. Adapun departemen yang akan dijelaskan adalah Departemen KAA (Departemen Klinik Agribisnis dan Agrowisata). Departemen ini diangkat oleh peneliti dikarenakan memiliki peranan penting terhadap dampak lingkungan di sekitar obyek kusuma agrowisata khususnya Desa Sisir. Departemen KAA ini memiliki bentuk proyek yaitu bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan bidang perkebunan, agrobisnis dan agrowisata dengan memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, kursus, magang kerja dan kerja di bidang agro. Proyek pengembangan ini juga membutuhkan partisipasi dan pemberdayaan dari masyarakat setempat/ sekitar dari obyek wisata kusuma agrowisata.

(3) Industri dan Distribusi Produk

Berkaitan dengan industri dan kegiatan distribusi produk olahan yang dihasilkan, Kusuma Agrowisata memproduksi beberapa produk olahan yang sudah jadi dan dapat dipasarkan ke berbagai kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, diantaranya adalah : Sari apel, Sari strawbeery, Sari jeruk, Sari sirsat, Cuka Apel, Jenang dan wingko Apel, kopi Arabika, serta sayur-sayuran hidroponik (Brokoli, bawang, sawi, dan kentang). Dari hasil olahan tersebut akan didistribusikan ke kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogjakarta, Malang, Kediri, hingga di Pulau Bali. Sarana pengangkutannya dengan menggunakan Mobil Box yang dimiliki oleh Kusuma Agrowisata dan cargo baik udara maupun laut.

2. Data Fokus Penelitian

a. Upaya Pemerintah Kota Batu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batu melalui sektor pariwisata

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang sama-sama mendesak untuk ditangani secara bersamaan. Banyak kajian membuktikan bahwa meluasnya kemiskinan, cepat atau lambat akan meningkatkan ketidakmerataan dalam pendapatan, kesenjangan dalam distribusi aset, perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan pemilikan tanah, dan ujungnya akan meningkatkan kesenjangan absolut maupun relatif .

Di Kota Batu sendiri, program penanggulangan kemiskinan sebetulnya telah lama memperoleh perhatian yang serius. Tidak sedikit dan energi telah dicurahkan Pemerintah Kota Batu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan sekaligus memberdayakan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Tetapi, alih-alih jumlah penduduk miskin dapat dikurangi, yang terjadi dilapangan justru acapkali sebaliknya. Akibat kebijakan pemerintah pusat yang sering membuat kebijakan-kebijakan baru dan meluasnya situasi krisis yang di ikuti dengan kenaikan harga (Bahan Bakar Minyak) BBM dan gas yang terjadi belum lama ini, kembali masyarakat miskin dihadapkan pada perubahan situasi yang terlalu cepat sehingga perekonomian kembali menjadi lesu.

Pada batas-batas tertentu, studi ini dapat mengidentifikasi berbagai persoalan dan situasi problematik yang dihadapi keluarga miskin di Kota Batu. Secara umum, akibat kenaikan harga BBM, kehidupan keluarga miskin yang ada di berbagai wilayah cenderung makin rentan dan bahkan tidak sedikit yang usahanya terancam *collapse*. Lebih dari sekedar kekurangan modal dan keterbatasan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang terus naik, dalam kenyataan tidak sedikit keluarga miskin yang ada telah terperangkap pada apa yang disebut oleh Robert Chambers sebagai “Perangkap Kemiskinan”, yakni gabungan dan akumulasi tekanan kemiskinan yang dihasilkan oleh kemiskinan itu sendiri, kerantanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani.

Dalam perkembangan penanggulangan kemiskinan yang jadi pemikiran pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah selama ini lebih terfokus pada program klasik yang terus mangacu pada pertumbuhan ekonomi, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain dengan memberikan bantuan dana IDT, JPS, PPK, Program Tukesra-Kukesra dan lain-lain. Pada kesempatan lain, Pemerintah Kota Batu memiliki kebijakan lain dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan upaya/ cara menjalin program kerjasama dengan institusi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kota Batu sadar akan potensi yang dimiliki daerahnya yaitu terletak pada, sektor pariwisata alam dan pertaniannya yang di dukung oleh sumber daya alam yang tersedia, disertai dengan pemberdayaan manusianya.

Namun secara keseluruhan penanggulangan kemiskinan masih merupakan *side stream of development* dari pada *mainstream of development*. Disamping itu karena penanggulangan kemiskinan dikendalikan dalam kisi-kisi pemerintahan yang sentralistis maka kemiskinan cenderung dilihat sebagai sosok yang tanpa bentuk, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan bersifat stereotipikal dan seringkali tidak sensitif terhadap *felt-needs* masyarakat miskin. Dengan diundangkannya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih *location specific* dan *problem specific*. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai suatu konsep yang abstrak akan tetapi merupakan fenomena multidimensional yang bersifat kontekstual.

1) Menjalinkan Kerjasama Antar Institusi

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam penanggulangan kemiskinan, diantaranya selain melalui program-program sosial dan bantuan yaitu melalui program kerjasama antar institusi. Kerjasama ini dilakukan antara institusi yang saling terkait dalam pembangunan secara menyeluruh di bidang peningkatan sosial ekonomi. Dalam kerjasama harus terdapat faktor-faktor utama yang penting, diantaranya seperti kerjasama dalam penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu lain agar mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu atau tahapan tertentu, agar kolaborasi antar kedua pihak yang terlibat dapat terjalin sebuah komunikasi. Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka kerjasama dan kolaborasi dari kedua pihak yaitu pemerintah dan swasta dalam menyelenggarakan kepentingan bersama dimana dalam prakteknya terbentuk suatu institusi atau lembaga yang menjadi wadah dan mewakili kedua pihak tersebut. Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan yang berada di atas kepentingan yang lain, semuanya harus sejajar sehingga tidak ada kepentingan yang terabaikan.

Dalam kerjasama ini Pemerintah Kota Batu melakukan kerjasama dengan institusi swasta yang berkomitmen penuh terhadap perkembangan kepariwisataan yang berbasis utama pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan yaitu Kusuma Agrowisata sebagai mediasi kerjasamanya. Data yang terlampir diatas

diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dra. Retno selaku Kepala bidang pemerograman Dinas Pariwisata Kota Batu sebagaimana berikut ini.

“Dalam program-program yang ada dan telah dibuat oleh pemerintah, maka penerapannya dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak PT.Kusuma. Kerjasama tersebut ditekankan pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan”.(wawancara tanggal 22 Agustus 2008)

Kerjasama antar institusi ini bertujuan pokok untuk penanggulangan kemiskinan di daerah Pemerintahan Kota Batu melalui potensi yang ada dan perlu dikembangkan lebih lanjut, yaitu pada sektor pariwisata. Karena bukan rahasia umum lagi kalau pariwisata merupakan alat pemasukan/ Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama selain dari pendapatan dari sektor pajak. Dalam pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan partisipatif atau dalam istilah lain yaitu demokratis sehingga *good governance* dapat terwujud dalam kerjasama yang dijalankan.

Pola kemitraan yang berjalan di sektor pemerintahan dan swasta sebagai pemegang kendali pariwisata selama ini ada beberapa macam bentuk, dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi daerah disekitarnya.

- a) Berdasarkan jangka waktunya dapat dibedakan ;
 - (1) Kemitraan isidentil,
 - (2) Kemitraan jangka menengah,
 - (3) Kemitraan jangka panjang dan terus menerus.
- b) Berdasarkan pola kerjasamanya kemitraan dapat dibedakan antara lain ;
 - (1) Pola kontrak kerja,
 - (2) Pola kontrak manajemen,
 - (3) Pola unit pelaksanaan proyek,
 - (4) Pola perusahaan petani.
- c) Kemitraan berdasarkan sumber dan pengaturan modal
 - (1) Kerjasama dengan sistem bagi hasil,
 - (2) Sistem kredit koperasi,

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan nara sumber yang ada dilapangan dan data tertulis yang di dapatkan oleh penulis, maka pola

kemitraan yang terlaksana dan dipakai selama ini adalah kemitraan jangka waktu panjang dan terus menerus dengan pelaksanaan pola kerjasama kontrak kerja, kontrak manajemen dan pelaksanaan proyek. Sedangkan berdasarkan sumber dan pengaturan modal, yang digunakan adalah kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Pola kemitraan ini berlaku atas kesepakatan pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan sama-sama mendapatkan keuntungan. Data ini ditunjang oleh keterangan dari koordinator klinik Kusuma Agrowisata, Bapak Paulus Hari sebagai berikut

“...Selama ini dan sampai sekarang, pola kerjasama yang kita terapkan dan kita pakai adalah jangka panjang dengan sistem bagi hasil. Ini diterapkan karena dengan pengelolaan jangka panjang maka kita (Kusuma Agro dan Kelompok tani) bisa saling mendapatkan keuntungan. Kusuma untung dalam hal hasil produksi dan kelompok tani untung dalam ilmu hasil pelatihan dan penjualan hasil panen, sedang pemerintah untung karena program pengentasan kemiskinannya berjalan”. (wawancara pada tanggal 26 Agustus 2008, di klinik Kusuma Agro)

Kerjasama antar institusi yang di lakukan dengan pihak swasta dalam kepariwisataan untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Batu lebih dititik utamakan pada sektor pemberdayaan masyarakat/ manusia melalui program pelatihan-pelatihan pertanian dan budidaya-budidaya perkebunan. Ini disebabkan karena Kota Batu cenderung kaya akan potensi alam sebagai pendukung pertanian. Sangat disayangkan bila ada daerah yang berpotensi tetapi tidak dimaksimalkan untuk peningkatan taraf hidup penduduknya, maka dari itu sebagai pelaku pariwisata dan yang memiliki tanggung jawab pada bidang pariwisata, Disparta memiliki program kerjasama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno selaku Kepala Bidang Program di Dinas Pariwisata Kota Batu seperti berikut :

“Sebagai pelaku pariwisata, kita juga memikirkan bagaimana caranya agar kepariwisataan yang kita kelola ini bisa berujud, atau berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara sosial ekonomi. Salah satu usaha itu, diantaranya dengan menggandeng pihak swasta sebagai mitra kerja. Jenis kerjasama ini kita fokuskan pada sektor pemberdayaan manusia, dengan program pelatihan sebagai menu utama.” (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2008, di ruang kerja).

Fleksibilitas kemitraan menyebabkan ideal bagi kerjasama awal. *Pertama*, kemitraan tidak merubah independensi organisasi yang mensponsori. *Kedua*,

kemitraan melibatkan resiko yang relatif rendah karena kemitraan bisa terus berlangsung hanya selama partner mau. *Ketiga*, ketika organisasi bekerjasama, mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka seharusnya memahami satu sama lain lebih baik, bisa memprediksi satu sama lain lebih baik, bisa memprediksi tindakan satu sama lain, dan memperkuat kepercayaannya satu sama lain (Child dan Faulkner, 1998). Dari penjelasan teori di atas, agar tercipta tujuan kerjasama yang baik maka, kedua belah pihak penjalih kerjasama yaitu pemerintah dan swasta harus saling percaya satu sama lain. Teori diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Paulus Hari, selaku Koordinator Klinik kebun Kusuma Agrowisata, sebagai berikut:

“..Yang terpenting dari program kerjasama antara, Kusuma Agro dan pihak pemerintah salah satunya yaitu harus saling percaya antara satu pihak dengan pihak lainnya, harus jelas peran masing-masing pihak, dan transparan dalam hal pendanaan kegiatan program kerjasama.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2008, di kebun Kusuma Agrowisata)

Kegiatan kerjasama antar institusi pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan harus melalui tahapan yang rumit dan jelas tata aturannya, mengingat banyak dan pentingnya jenis kegiatan/ program yang harus dijalani. Dari hasil observasi yang di dukung oleh penelitian secara langsung, maka peneliti dapat mengetahui beberapa tahapan dari rangkaian kerjasama antar institusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui pariwisata. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari tahap (*inputting*), pembuatan perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak yang isinya antara lain; mahsud dan tujuan, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan sanksi. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama (*processing*), hingga menghasilkan suatu dampak nyata dari pelaksanaan program (*outputting*), dan diakhiri dengan pengendalian (*controlling*) agar hasil dari program dapat terlaksana dan tetap terus berjalan secara berkesinambungan.

Adapun tahap-tahap dari rangkaian kerjasama antar institusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui pariwisata yang diamati oleh penulis di berbagai tempat penelitian yaitu sebagai berikut:

a. *Inputting*

Pada tahap awal kerjasama ini adalah proses pengumpulan bahan/data, yang ada kaitannya dengan perjanjian kontrak kerjasama antara lain yaitu, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan sanksi. Pemasukan/ modal awal dari proses kerjasama yang bertujuan untuk saling mendapatkan keuntungan disemua pihak yaitu pemerintah, Kusuma Agrowisata dan kelompok usaha tani. Semua proses yang tergabung di dalam inputting, adalah sebuah awal dari indikasi tercapai tidaknya sebuah pemikiran atau perencanaan yang diinginkan.

b. *Processing*

Pengolahan maksudnya adalah manipulasi masukan untuk di ubah menjadi keluaran sebagaimana yang direncanakan, pengolahan ini yaitu pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama dalam sebuah komitmen kerjasama. Jadi pelaksanaan bentuk kerjasama yang telah disepakati diproses untuk dijadikan sebuah *output* sebagaimana yang telah direncanakan. *Processing* disini, adalah sebuah bentuk pelaksanaan program yaitu program-program pemberdayaan sumber daya manusia melalui proses pelatihan pertanian, pengolahan tanah, manajemen pengolahan kebun dan sebagainya.

c. *Outputting*

Yang di maksud dengan *outputting* adalah proses menghasilkan keluaran, yaitu menghasilkan suatu dampak yang berarti pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup manusia dari sisi sosial maupun perekonomian. Dampak-dampak yang dimaksud di sini antara lain yaitu dampak terhadap peluang kerja, peluang usaha dan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

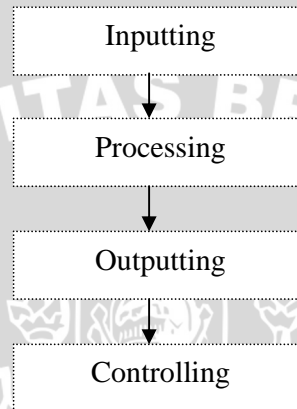
d. *Controlling*

Pengendalian (*controlling*) dalam hal ini mengarahkan pada pola dan urutan kegiatan sehingga ketiga operasi diatas dapat terlaksana sebagaimana

yang dikehendaki atau yang direncanakan semula. Pengendalian dari semua yang di maksud tersebut diatas bertujuan agar kerjasama yang menguntungkan dapat berjalan secara terus menerus dan selalu berkesinambungan untuk terus menjadikan program yang menghasilkan hasil yang terbaik

Gambar : 8

Tahap-Tahap Program Kerjasama



Sesuai dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam bagan diatas, di dukung oleh data hasil obserfasi dan wawancara dengan berbagai nara sumber yang berpartisipasi didalamnya sebagaimana berikut di bawah ini.

“... kerjasama yang ada dapat berjalan lancar bila kita bersama-sama menciptakan sebuah komitmen kesepakatan dan kesepahaman melalui sebuah tahapan. Tahap-tahap itu antara lain *inputting*, sebagai awal berjalannya sebuah pemikiran yang di dalamnya tercantum tentang maksud dan tujuan kerjasama, hak dan kewajiban pihak yang terkait, urusan pembiayaan serta jangka waktu kerjasamanya. *processing*, *outputting* dan yang terakhir adalah *controlling*, dimana menjadi sebuah bahan evaluasi apakah semua yang di upayakan ini termasuk berhasil atau sebaliknya. (wawancara dengan Paulus Hari, tanggal 21 September 2008)

Dari wawancara diatas menunjukkan bawasannya suatu program dalam pelaksanaannya harus diawali dengan konsep pemikiran yang baik dan terencana. Konsep yang ada bisa berupa tahapan-tahapan yang saling terkait satu sama lain, mulai dari awal yaitu sebuah pemikiran, pengolahan/ pelaksanaan, hasil dan yang terakhir berupa pengendalian agar terus terlaksana secara kesinambungan, kompeten dan terus menerus.

2) Pemberdayaan masyarakat melalui institusi swasta

Pemberdayaan adalah sesuatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara *evolitif*, dengan keterlibatan semua potensi.

Sedang pemberdayaan masyarakat bisa diartikan bahwa masyarakat diberikan kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya (Suhendra,2006:75). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi, pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi dimana kesempatan-kesempatan ekonomi tertutup bagi mereka. Karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil dari berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan baik untuk menentukan atau memperbaiki kehidupannya dan memperkuat kemampuan masyarakat. Pemberdayaan dalam konsep pengentasan kemiskinan terangkum dalam konsep *Tridaya* yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan lingkungan agar tercipta masyarakat pembangunan. Dan jika pelaksanaan program pembangunan diserahkan pada lembaga masyarakat setempat dimana fungsi dan perannya sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakat, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut tergolong tinggi.

Pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan akan dapat efektif apabila pada tingkatan akar-rumput dikembangkan pola kewirausahaan endogen. *Microenterprises* pada tingkat lokal ini akan mempunyai dampak yang positif bagi penanggulangan kemiskinan karena *multiplier* dan *spread effect* nya pada ekonomi lokal dan kemampuannya untuk meminimalkan

leakage akan mempunyai dampak positif bagi penciptaan peluang kerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Pengembangan kewirausahaan endogen ini dilakukan antara lain melalui pelatihan, pemberian kredit, pengembangan pemasaran dan sebagainya. Penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata menyangkut pembinaan kesadaran para pelaku pariwisata bahwa apa yang mereka lakukan dapat menimbulkan efek bagi masyarakat miskin (baik secara positif maupun negatif) dan mengidentifikasi berbagai peluang untuk dapat mengikut sertakan rakyat miskin dalam kegiatan pariwisata.

Program-program dan potensi income pemberdayaan masyarakat yang di kelola oleh pihak Kusuma Agrowisata:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Praktek Kerja Lapangan
 - b. Penyusunan Skripsi
 - c. Magang Kerja
2. Pelatihan
 - a. Budidaya Apel
 - b. Budidaya Jeruk
 - c. Budidaya Hidroponik
 - d. Budidaya Strawberry
 - e. Budidaya Buah Naga
 - f. Budidaya Sayur Organik
 - g. Pengelolaan Wisata Agro
3. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Agens Hayati
 - b. Kompos
 - i. Media Padat
 - ii. Media Cair
4. Jasa Konsultasi Klinik Agrobisnis dan Agrowisata
 - a. Pembuatan Rumah Kaca
 - b. Setting Pertamanan
 - c. Konsultasi Usaha Hortikultura
5. Jasa Wisata Pertanian dan Perkebunan
(Dokumen PT.Kusuma Agrowisata)

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dikelola Kusuma Agrowisata seperti yang tertera pada hasil data tertulis diatas didukung oleh data hasil wawancara dengan Koordinator Klinik Kusuma Agrowisata, Bapak Paulus Hari, S.Hut sebagaimana tertera sebagai berikut disertai dengan data dokumentasi berupa foto pada lokasi perkebunan sebagai tempat lokasi pelatihannya.

“...program pemberdayaan masyarakat yang kita kelola dan kita kembangkan terdiri dari beberapa hal pokok, antara lain bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi klinik agrobisnis dan agrowisata. Dari semua program yang ada dan yang kita kelola, program pelatihan dan penelitian serta pengembangan adalah program yang paling kita utamakan untuk dijalani. kenapa... dua program itulah yang sangat-sangat menghasilkan dan paling tampak hasil akhirnya bagi masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. (wawancara tanggal 21 September 2008)

Dari data hasil wawancara secara langsung dengan kondisi yang akrab diatas, bisa memberi gambaran bahwa, dua program yang disebut dalam wawancara diatas adalah program yang paling primadona dan paling diminati karena sangat nyata hasilnya. Terutama karena pihak Kusuma Agrowisata telah memberikan hasil nyata dan tampak mata sebagai sebuah keberhasilan dalam pengelolaannya. Hasil itu tampak dan terekam dalam sebuah dokumentasi berupa foto dari peneliti sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar: 9

Gambar Kebun Apel dan Hotel Kusuma Agrowisata



Gambar salah satu area kebun apel



Gambar Hotel Kusuma Agrowisata

b. Kerjasama Pemerintah Kota Batu dan Kusuma Agrowisata dalam penanggulangan kemiskinan

Demi tercapainya otonomi daerah, yang mempunyai arti, memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan ditunjang dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 pasal 6 ayat

2 tentang urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dalam penanggulangan kemiskinan. Maka Pemerintah Kota Batu berhak melakukan kebijakan sendiri dengan melakukan program-program yang sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah, yaitu melalui sektor pariwisata yang berbasis pertanian.

Program-Program ini antara lain dengan melakukan kerjasama/ kemitraan dengan institusi swasta yang berkomitmen penuh terhadap kemajuan sektor pariwisata dan pertanian, yaitu melakukan *partnership* dengan Kusuma Agrowisata. Secara umum konsep *publik-private partnership* ini dapat diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk kontraktual antara pihak publik (federal, lembaga negara) dengan pihak kedua (perusahaan swasta) yang bertindak atas dasar mencari keuntungan melalui perjanjian ini. Seluruh kemampuan dan aset dari masing-masing pihak (publik dan swasta) dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah fasilitas yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Dalam rangka berbagi sumber daya alam yang ada, setiap pihak juga saling berbagi dalam menanggung beban resiko yang mungkin muncul serta potensi keuntungan yang akan diperoleh dari fasilitas umum yang dihasilkan.

Dalam buku *Public-Private Partnership for Sustainable Development* (2002: 26) yang dikutip oleh Irawan (2004:21) dijelaskan bahwa bentuk kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai macam model, dimana model-model dari *Public-private partnership (PPP)* yang digunakan antara Pemerintah Kota Batu dengan Kusuma Agrowisata yaitu:

Build-Own-Operate (BOO)

Model kerjasama ini memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada sektor publik tanpa harus mengalihkan kepemilikan fasilitas tersebut kepada pihak publik. Dan tidak ada keharusan pada pihak publik untuk membeli dan mengambil alih kepemilikan atas fasilitas tersebut kecuali pihak publik sendiri yang menghendaknya. Dari kerjasama ini pihak publik akan memperoleh sumber pendapatan baru atas pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh fasilitas tersebut, disisi lain pihak publik juga telah menunaikan

kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang di harapkan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.

Developer Finance

Model kerjasama ini dilakukan melalui pembangunan atau pengembangan fasilitas umum yang telah ada, dimana biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan atau pengembangan ini dibebankan pada pihak swasta, sebagai timbal baliknya pihak swasta di berikan kewenangan untuk membangun kompleks pemukiman, perdagangan dan fasilitas pendukung disekitar lahan tersebut. Pihak swasta tersebut memberikan kontribusi melalui penanaman modal dan diberikan kewenangan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dibawah kontrol dan pengawasan dari pemerintah, dengan kegiatan tersebut maka pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dari pengembangan kawasan yang dilakukannya atas pembelian dan penyewaan fasilitas pendukung yang mereka bangun. Dari hasil pemasukan yang diperoleh melalui pembagian keuntungan dari pihak swasta tersebut, hasilnya dapat digunakan untuk perluasan pembangunan fasilitas pelayanan yang telah ada.

Dari paparan diatas yang telah disebutkan secara terperinci, kita telah mengetahui tentang apa dan bagaimana konsep sarta model dari *Publik-Private Partnership* itu. Selanjutnya akan coba memaparkan bagaimana bentuk kerjasama ini dapat dilakukan secara optimal atau dengan kata lain yang akan dipaparkan disini adalah semacam apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan kerjasama.

1) Pola kerjasama

Pola kemitraan yang berjalan di sektor pemerintahan dan swasta sebagai pemegang kendali pariwisata selama ini ada beberapa macam bentuk, dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi daerah disekitarnya. Sistematis kerjasama yang di terapkan oleh Pemerintah Kota Batu dengan Kusuma Agrowisata, antara lain dilakukan berdasarkan jangka waktunya yaitu kemitraan secara jangka panjang dan terus menerus. Kemitraan ini dilakukan dalam bentuk jangka panjang dan terus menerus dalam skala besar dengan

perjanjian tertulis. Kemitraan ini didasari saling ketergantungan dalam hal pengadaan bahan baku, permodalan, manajemen dan lain-lain misalnya kepemilikan perusahaan oleh petani atau koperasi.

Berdasarkan pola kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, terdiri dari empat pola kerjasama utama yaitu;

a) Pola kontrak kerja

Dalam pola ini petani atau koperasi dan perusahaan agrobisnis menjalin kerjasama dengan melakukan kontrak kerja, baik dalam penyediaan sarana produksi dari perusahaan maupun jaminan pemasaran hasil produksi petani ke perusahaan. Dengan demikian perusahaan terbatas hanya pada pengolahan dan pemasaran komoditas yang dihasilkan.

b) Pola kontrak manajemen

Bentuk kemitraan pola ini berupa bantuan manajemen usaha tani seperti koperasi jasa manajemen maupun perusahaan agrobisnis kepada petani atau kelompok tani dalam kontrak. Dalam pola ini, koperasi atau perusahaan melayani kegiatan usaha agrobisnis yang dikembangkan petani atau kelompok tani sekaligus melakukan bimbingan dan pembinaan.

c) Pola unit pelaksanaan proyek

Pola ini menyertakan peran aktif pemerintah dalam pembentukan usaha agrobisnis sejak awal sampai pada saat dikonversikan kepada petani. Pengadaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil mendapatkan bantuan serta dukungan pembinaan dan pengendalian dari pemerintah, hanya saja bantuan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan.

d) Kerjasama dengan sistem bagi hasil

Bentuk kerjasama ini merupakan kerjasama antara dua pihak yaitu petani dan perusahaan pembimbing dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sumber permodalan dalam kerjasama ini berasal dari perusahaan pembimbing yang berupa, bibit tanaman, pupuk, obat, biaya pengolahan tanah hingga pemeliharaan sampai panen.

Dari pola-pola kerjasama diatas yang ada dan diterapkan, didukung oleh pendapat dan hasil wawancara dari beberapa nara sumber yang berkomitmen

terhadap usaha program kerjasama Pemerintah Kota Batu dan Kusuma Agrowisata. Diantaranya yaitu keterangan dari Lurah Kelurahan Sisir, yaitu sebagai berikut

“...Dengan adanya pola kemitraan yang jelas dan transparan, seperti tentang kontrak kerja, sistem bagi hasil, kontrak manajemen dan unit pelaksanaan proyek maka hasilnya bisa tampak nyata pada pendapatan masyarakat itu sendiri dan pemerintah. Ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan taraf hidup dari masyarakat di bawah kepemimpinan saya *mas...*, Disamping itu peningkatan juga terlihat pada PAD Kota Batu. Kalau *mas* tidak percaya, coba *aja* cek di Dispenda.” (Wawancara dengan Bapak Arief selaku Lurah Kelurahan Sisir, tanggal 19 Agustus 2008).

Dari hasil keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa dengan pola-pola kemitraan yang jelas maka bisa mengakibatkan suatu hasil yang nyata. Dalam kerjasama antar institusi ini menggunakan pola kerjasama utama yaitu pola kontrak kerja, pola kontrak manajemen, pola unit pelaksanaan proyek dan pola kerjasama dengan sistem bagi hasil. Hasil itu terlihat jelas dan tampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Dan yang pasti, kerjasama antar institusi adalah cara untuk mencari keuntungan dari semua pihak, khususnya institusi swasta yang melakukan program pengembangan masyarakat dan daerah. Analisis ini di dukung oleh keterangan dari Bapak Yamil selaku Sekertaris Kecamatan Batu, yaitu sebagai berikut

“...Dalam *Publik-private partnership* dengan swasta, pihak swasta pastilah mengambil keuntungan, ini dikarenakan swasta pasti *money oriented* beda dengan pemerintah yang seutuhnya mempunyai misi *public service* pada rakyatnya. Tapi yang terpenting kota ini bisa berkembang dalam hal pembangunannya yang di dukung oleh SDM yang berkualitas.” (Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2008)

Dari hasil wawancara tersebut diatas, penulis mencoba memberikan data yang mendukung tentang pengurangan data masyarakat yang tercantum pada peta kemiskinan Kelurahan Sisir dalam perbandingan pada tahun 2006 dan 2007 berupa bentuk angka dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu antara tahun 2006 sampai 2007 per Bulan Desember.

Tabel . 7
Peta Kemiskinan Kelurahan Sisir Tahun 2006-2007

Rukun Warga	Jumlah Penduduk 2006	Jumlah Penduduk 2007
1	576	489
2	106	77
3	323	276
4	93	61
5	201	172
6	129	116
7	89	33
8	189	91
9	128	136
10	97	90
11	382	355
12	130	130
13	82	62
Total Jumlah : 13 RW	Total : 2525 Orang	Total : 2178 Orang

Sumber Kelurahan Sisir – Batu

Dari data tertulis diatas, dapat dijabarkan bahwa Kelurahan Sisir memiliki 13 Rukun Warga, Pada tahun 2006 di dalamnya terdapat 2525 orang yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Sedangkan pada tahun 2007, juga masih terdapat 13 Rukun Warga yang di dalamnya terdiri dari 2178 orang yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini indikator perhitungannya berdasarkan pendapatan perbulannya di bawah nominal angka Rp. 100.000,00- ataupun pendapatannya tidak jelas. Dari perbandingan antara tahun 2006 sampai 2007, terjadi penurunan angka pada peta kemiskinan di Kelurahan Sisir. ini menunjukkan bawasanya program pembangunan yang bertitik utama pada penanggulangan kemiskinsn menunjukkan hasil yang positif.

Dari data peta kemiskinan di Kelurahan Sisir ini didukung oleh pendapatan pertahun dari Kota Batu yang juga mengalami peningkatan yang

positif. Kenyataan ini juga ditunjang oleh data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006 dan 2007 sesuai yang di paparkan pada data tabel seperti yang ada di bawah ini.

Tabel . 8
REKAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) dan BAGI HASIL PAJAK
KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2006
BULAN DESEMBER

No	JENIS PENDAPATAN	Target Setelah PAK	Jumlah Realisasi Penerimaan			%	SISA
			s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini		
1	Pajak Daerah	5.186.276.000,00	5.828.857.776,00	427.263.810,00	5.756.121.586,00	110,99	569.845.586,00
2	Retribusi Daerah	2.514.100.000,00	1.913.303.555,00	266.493.345,00	2.179.796.900,00	86,70	(334.303.100,00)
3	Laba Perusahaan Milik Daerah	279.148.102,45	282.005.597,45	-	282.065.597,45	101,05	2.917.495,00
4	Pos Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	3.140.000.000,00	3.078.142.242,00	948.664.591,80	4.026.806.834,05	128,74	886.806.834,05
5	Bagi Hasil Pajak	1.929.405.046,00	9.774.210.206,00	143.381.810,00	15.067.926.598,00	115,97	2.074.521.552,00
6	Bagi Hasil Bukan Pajak	542.438.700,00	518.645.730,00	17.250.787,00	662.027.540,00	122,05	119.583.840,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	8.862.505.177,00	11.929.422.505,00	17.250.787,00	11.946.673.929,00	134,80	3.084.168.115,00
	Jumlah	19.627.862.025,45	24.068.922.136,45	1.819.305.111,80	26.921.208.874,50	800,30	7.072.146.522,05

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu per Bulan Desember

Dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak Kota Batu tahun anggaran 2006 yang didapat oleh peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu seperti tersaji diatas, menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli kota batu yang utama terletak pada pajak daerah yakni sebesar Rp.5.756.121.586,00. Pajak daerah sendiri terdiri dari beberapa sumber yakni antara lain: Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan parkir. Pemasukan terbesar kedua setelah dari sektor pajak yakni dari penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.4.026.806.834,05. Penerimaan lain-lain yang sah ini bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti rugi daerah dan lain sebagainya.

Sumber pendapatan dari sektor lain juga tidak bisa diabaikan begitu saja, karena semuanya saling keterkaitan satu sama lain dan saling menunjang. Bila ditelaah lebih lanjut, PAD Kota Batu tahun 2006 sendiri sebenarnya melebihi dari target perencanaan yang telah dianggarkan yakni sebesar Rp. 19.627.862.025,45-, sedangkan pendapatannya dalam tahun 2006 sebesar Rp. 26.921.208.874,50. Dari

data yang tertera diatas maka dalam tahun 2006 Kota Batu mendapatkan pemasukan bersih di kas daerah sebesar Rp. 7.072.146.522,05.

Sedangkan sebagai perbandingan, dapat dilihat pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2007 seperti yang tertera pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel . 9
REKAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) dan BAGI HASIL PAJAK
KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2007
BULAN DESEMBER

No	JENIS PENDAPATAN	Target Setelah PAK	Jumlah Realisasi Penerimaan			%	SISA
			s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini		
1	Pajak Daerah	7.105.000.000,00	4.600.955.528,00	788.859.865,00	5.389.815.393,00	75,86	1.715.184.607,00
2	Retribusi Daerah	2.888.325.000,00	1.981.107.183,00	254.256.626,00	2.235.363.809,00	77,39	(648.902.921,00)
3	Laba Perusahaan Milik Daerah	810.765.005,75,	363.182.500,75	-	363.182.500,75	44,80	447.582.505,00
4	Pos Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	1.998.058.506,00	406.971.785,84	2.674.260.932,60	6.744.232.718,44	337,54	1.494.920.484,00
5	Bagi Hasil Pajak	1.929.405.046,00	9.774.210.206,00	143.381.810,00	15.067.926.598,00	115,97	2.074.521.552,00
6	Bagi Hasil Bukan Pajak	542.438.700,00	518.645.730,00	17.250.787,00	662.027.540,00	122,05	119.583.840,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	8.862.505.177,00	11.929.422.505,00	17.250.787,00	11.946.673.929,00	134,80	3.084.168.115,00
Jumlah		23.575.739.607,00	28.955.846.69,69	3.753.312.807,60	24.969.189.658,19	908,41	9.584.864.024,00

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu per Bulan Desember

Pada data tertera diatas menunjukkan perubahan pada pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana pada tahun sebelumnya merupakan titik pendapatan yang terbesar. Ini menunjukkan indikasi bawasannya pajak yang diterima dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan mengalami penurunan, yang berarti juga mewakili bahwa berkurangnya peminat pada pemakai fasilitas. Sedang pada pos penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan pada penerimaan, jauh dari target yang dianggarkan dalam PAK Dinas Pendapatan Kota Batu.

Tetapi pada tahun 2007 pendapatan terbesar justru beralih pada bagi hasil pajak sebesar Rp. 15.067.926.598,00 dan pendapatan bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp. 11.946.673.929,00. Pada akhirnya dari data yang tertera diatas maka dalam tahun 2007 Kota Batu mendapatkan peningkatan pada pemasukan bersih di kas daerah sebesar Rp. 9.584.864.024,00

2) Peran masing-masing pihak

a) Peran Pemerintah

Dengan dukungan UNDP dan *World Tourism Organization (WTO)*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Budaya dan Pariwisata telah bekerja merumuskan kerangka kebijakan secara umum untuk pembangunan kesinambungan dan manajemen pariwisata berbasis masyarakat di dalam konteks penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah berharap bahwa pariwisata berbasis masyarakat bisa berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengurangi kemiskinan, untuk sarana keadilan di dalam pembangunan dan untuk memberikan otonomi pada pemerintah daerah. Kerangka kebijakan ini menentukan tantangan penting dan peluang bagi pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan aktifitas ekonomi penting yang jika dikembangkan dengan tepat bisa mengatasi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan. Khusus untuk pengurangan/ penanggulangan kemiskinan, pariwisata berbasis masyarakat bisa menjadi solusi ideal dalam mengatasi kemiskinan. Karena masyarakat berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, setiap objek lokal memiliki daya tarik unik dan prospek ekonomi. Pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat bisa terlaksana secara efektif dan efisien bila ditunjang dengan keseriusan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Peran-peran pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan program kerjasama antar institusi antara lain yaitu;

(1) Sebagai fasilitator

Peran pemerintah Kota Batu sebagai fasilitator diwakili oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Fasilitator disini diartikan sebagai alat penyambung lidah sebuah kebijakan, dari pemerintah daerah sebagai pusat pemerintahan di Kota Batu, melalui Dinas Pariwisata sebagai perwakilan dan ditujukan pada masyarakat Kota Batu dengan melakukan kerjasama/kemitraan dengan institusi swasta sebagai pengembang pelatihan pemberdayaan masyarakat, dan demi terciptanya tujuan pemerintah daerah

sebagai bentuk untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. Data ini diperkuat oleh keterangan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program Disparta Batu, Ibu Dra. Retno M, S.pd sebagai berikut,

“...Disamping sebagai pembuat program kepariwisataan, Dinas Pariwisata juga punya peran sebagai alat penyampaian atau bahasa mudahnya sebagai *penyambung lidah* keputusan, dari pihak pemerintah kepada masyarakat melalui pihak yang berkepentingan. pihak ketiga ini yaitu institusi swasta yang *mas* pakai sebagai obyek penelitian.” (wawancara pada tanggal 22 Agustus 2008)

Sebagai *penyambung lidah/ penyampaian kebijakan*, dan pembuatan program-program kerjasama yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendorong pengurangan kemiskinan dan penajaman target masyarakat yang sangat miskin sebagai bagian dari program-program pariwisata berbasis masyarakat. Program pelatihan dan pengembangan ketrampilan, sehingga keterlibatan kelompok sasaran perempuan di dalam pariwisata sebagai contoh harus diadopsi,
- b. Menyediakan kondisi-kondisi dan dukungan untuk pendanaan proyek-proyek pariwisata berbasis masyarakat jangka panjang oleh pemerintah pusat dan otoritas-otoritas pemerintah daerah,
- c. Menjamin bahwa proyek-proyek pariwisata berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang didorong dengan kekuatan permintaan sektor swasta dan pada dasarnya berbasis komersial. Sektor publik harus berfungsi didalam memperkuat dan memfasilitasi permintaan tersebut,
- d. Tradisional, liburan petualangan, kelautan dan produk-produk agrowisata. Semua ini perlu dikenalkan sebagai produk-produk komplementer untuk sektor pasar masal.

(2) Sebagai Media Promosi dan Pemasaran

Pemasaran bukan saja mencakup hasil-hasil produksi berupa barang saja, tetapi juga mencakup bidang jasa (*service*). Dalam beberapa hal *marketing* juga berbeda, karena biasanya sifat dari jasa itu bukanlah

kebendaan dan seringkali tidak dapat dipisahkan dari orang yang menghasilkan atau memberi jasa tersebut.

Pemasaran dapat dirumuskan sebagai suatu masalah pembelian dan penjualan sebagai aktivitas usaha, termasuk di dalam arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Konsep pemasaran merupakan suatu proses yang bergerak dengan dinamis kegiatannya memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi pemasaran itu tugasnya menggerakkan barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain, mempengaruhi konsumen agar tercapai penggantian hak milik melalui transaksi antara produsen dan konsumen.

Dalam hal ini intitusi pemerintah harus tahu dan sadar tentang fungsi dan kedudukannya dalam industri pariwisata. Bahwa pemerintah merupakan perantara (*broker*) antara perusahaan industri pariwisata (*tourist object, tourist transport, accomodation, grounding, sovenirshops, etc*) disatu pihak dan wisatawan di lain pihak. Sebagai perantara yang akan menjualkan barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan industri pariwisata, pihak pemerintah harus lebih dahulu mengetahui barang jasa apa yang dijualkannya, disamping harus mengetahui kebutuhan dan keinginan para konsumen yang berhubungan dengannya.

Berperan sebagai media perencanaan dalam kerjasama kemitraan, pemerintah juga memiliki perencanaan pemasaran, antara lain:

- (a) Target pasar: Menjelaskan mengenai profil (misalnya umur dan tingkat penghasilan) pelanggan yang akan memberi produk, karena mereka membentuk produk pasar.
- (b) Karakteristik Produk: Menjelaskan ciri khas produk yang di jual.
- (c) Penentuan Harga: Menjelaskan bagaimana produk akan diberi harga di bandingkan dengan harga produk pesaing.
- (d) Distribusi: Menjelaskan bagaimana produk akan didistribusikan
- (e) Promosi: Menjelaskan bagaimana produk akan di promosikan kepada pelanggan yang potensial. (Madura, 2001: 19)

Berperan sebagai media pemasaran dan promosi dari, segala fasilitas yang di miliki oleh pihak Kusuma Agrowisata sebagai perusahaan yang bermitra kerja dengan institusi pemerintahan, khususnya Dinas Pariwisata Kota Batu berupaya memasarkannya dengan cara menampilkan segala produk dari hasil fasilitas dan pelatihan, pembudidayaan hortikultura pada masyarakat luas secara periodik melalui pameran sebagai media pemasaran dan promosinya. Dapat pula melalui brosur (*leaflet, booklet, folder*, iklan media dsb). Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Retno M, S.pd. Selaku Kepala Bidang Program Disparta Batu.

“...Peran kita sebagai media pemasaran, kita jalankan dengan cara mengikuti agenda pameran, seperti pameran *Majapahit Trevel Fair, Pekan Raya Jakarta* dan sebagainya yang dilaksanakan secara periodik tiap tahunnya. Disamping itu, kita juga pasarkan langsung pada lembaga-lembaga pertanian yang ada di Jawa bahkan Indonesia”. (wawancara pada tanggal 22 Agustus 2008, di ruang kerja)

Seiya sekata juga diungkapkan oleh Bapak Paulus Hari. S.Hut selaku koordinator klinik Kusuma Agrowisata.

“...Kerjasama kita dengan pihak pemerintah juga tidak lepas menggunakan media pameran sebagai sarana memasarkan produk dan fasilitas yang kita punyai. *Toh* tujuannya juga sama kan *mas...* penanggulangan kemiskinan dari sektor wisata yang basisnya ada pada pertanian”. (wawancara pada tanggal 23 Agustus 2008, Di ruang Klinik)

Dari keterangan hasil wawancara diatas dengan nara sumber yang berbeda institusi, bisa di tarik kesimpulan dan analisis berupa adanya kerjasama yang berkesinambungan antara kedua institusi dalam hal pemasaran barang, jasa, produk, fasilitas pelatihan pertanian, pengembangan pemberdayaan manusia dan kepariwisataan yang berpotensi di Kota Batu, dalam tujuan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata berbasis pada pertanian.

(3) Sebagai Peminjam dan Penyandang Dana

Sebagai pemberi pelayanan pada publik/ *publik service*, pemerintah berperan sebagai penyandang dana dalam setiap program-program yang di

buatnya. Pemberian dana ini termasuk di dalamnya berupa dana pinjaman, yang apabila program tersebut telah berjalan maka peminjam modal diharapkan untuk mengganti/ mengembalikan dana yang di pinjamnya, dengan ataupun tanpa bunga modal (sesuai dengan perjanjian).

Pemberian dan pinjaman dana tersebut juga melalui sebuah prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan melalui pengajuan program kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Daerah (RAPBD) Kota Batu. Apabila disetujui oleh DPRD maka pinjaman/ pemberian dana tersebut akan tersealisasi dan secara langsung program kegiatanpun akan terlaksana.

Tetapi dari proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada kenyataannya tidak ditemukan data yang mengacu dan mendukung pada peran pemerintah sebagai penyandang ataupun peninjaman dana pada program-program kerjasama tersebut. Pendanaan program kerjasama tersebut lebih banyak di tekankan pada pihak swasta dan organisasi masyarakat itu sendiri. Keterangan ini didukung dari wawancara langsung penulis dengan tiga pihak penjalin kerjasama, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, swasta yang di wakili oleh Kusuma Agrowisata dan organisasi masyarakat yang diwakili oleh pihak kelompok petani (holtikultura). Berikut hasil wawancara yang didapat dari pihak pemerintah

“...Perkara penyandangan dana pada program-program kerjasama yang kita lakukan sebetulnya ada *mas..*, tapi kenyataan yang ada para kelompok petani lebih banyak mendanai sendiri program pelatihan atau apapun itu dengan dana swadaya mereka sendiri. Disamping itu, dan memang seharusnya pendanaan di bebankan pada pihak swasta, karena nanti bila ada keuntungannya pasti *incomenya* juga masuk pada swasta sendiri.” (wawancara dengan Drs. Made Suardika, sebagai Kasi Evaluasi, tanggal 21 Agustus 2008)

Dari hasil keterangan diatas, menunjukkan bahwa pada dasarnya ada pemberian dana pada masyarakat/ kelompok petani. tetapi para pelaku kerjasama yang lain lebih bersikap mandiri dan malas berhubungan dengan prosedur dari pemerintah pada program-programnya. Keterangan

diatas didukung oleh data yang didapat oleh institusi swasta sebagai berikut.

“...Kata siapa ada dana dari pemerintah, yang ada mereka *justru* minta hasil *profit* dari hasil keberhasilan program-program yang kita jalani. Kalaupun ada pemberian dana, prosedurnya *ruwet* dan bisa-bisa tidak terealisasi. *Lah..* kalau dananya tidak turun, program kitapun *ya gak* jalan-jalan. Maka dari itu *ya* kita danai saja sendiri.” (wawancara dengan Bapak Paulus Hari, selaku koordinator Klinik Kusuma Argo, pada tanggal 25 Agustus 2008)

Dari data diatas, terdapat kesimpang siuran dan rumitnya prosedur dari permasalahan pendanaan dari pemerintah. Oleh kerana itu institusi swasta lebih bersikap kreatif dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara pemberian modal dari pihak swasta itu sendiri. Keterangan diatas didukung oleh data dari pihak masyarakat sebagaimana berikut ini

“...Mungkin emang ada *mas...* tapi prosesnya panjang dan buntutnya gak jelas, katanya sih prosedurnya harus dianggarkan dulu pada tahun-tahun sebelumnya. *Lah,* terus kapan jalannya program pelatihan pertanian kita..” (wawancara dengan Bapak Suadmadi, sebagai ketua kelompok tani, pada tanggal 30 Agustus 2008)

Dari data hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak pemerintah dalam pemberian dana tidak berjalan dengan baik. Pihak yang berkepentingan yaitu para petani yang tergabung dalam wadah kelompok petani lebih bersikap mandiri dan bijaksana dalam menyikapinya dengan permodalan sendiri. Seharusnya pihak pemerintah lebih bijaksana dalam hal ini, yaitu dengan memberikan kemudahan pada pendanaan dengan cara dianggarkan terlebih dahulu dalam pemrogramanya tanpa harus menunggu adanya pengajuan program dari masyarakat ataupun dari pihak institusi lain.

b) Peran Swasta/ Kusuma Agrowisata

(1) Sebagai media pelatihan dan pemberdayaan masyarakat

Kusuma Agrowisata berperan sebagai media pelatihan dan pemberdayaan masyarakat tercantum dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis selama melakukan penelitian

dan observasi lapangan, bentuk pemberdayaan masyarakatnya tertera sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Praktek Kerja Lapangan
 - b. Penyusunan Skripsi
 - c. Magang Kerja
2. Pelatihan
 - a. Budidaya Apel
 - b. Budidaya Jeruk
 - c. Budidaya Hidroponik
 - d. Budidaya Strawberry
 - e. Budidaya Buah Naga
 - f. Budidaya Sayur Organik
 - g. Pengelolaan Wisata Agro
3. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Agens Hayati
 - b. Kompos
 - i. Media Padat
 - ii. Media Cair
4. Jasa Konsultasi Klinik Agrobisnis dan Agrowisata
 - a. Pembuatan Rumah Kaca
 - b. Setting Pertamanan
 - c. Konsultasi Usaha Hortikultura
5. Jasa Wisata Pertanian dan Perkebunan.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang lain dan intens dilakukan oleh pihak Kusuma Agrowisata adalah dengan bentuk memberikan pelatihan-pelatihan yang di kelola oleh pihak Klinik Agrobisnis, hal ini sama seperti yang di kemukakan oleh bapak Paulus Hari selaku Koordinator klinik Kusuma Agrowisata:

“yah,..... memang pihak Kusuma Agrowisata memiliki program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, yang dikelola oleh Klinik Agro Bisnis, misalnya pelatihan

budidaya tanaman kopi, jeruk, apel, sayuran (khususnya hidroponik), dan sekarang mengarah ke budi daya *organik farming*”.

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bawasanya pihak Kusuma Agro memiliki program pemberdayaan bagi masyarakat setempat, melalui pelatihan-pelatihan budidaya tanaman kopi, jeruk, apel, sayuran hidroponik dan budidaya *organik farming* (kegiatan pertanian organik).

Kusuma Agrowisata juga memiliki industri pengolahan pupuk kompos. Lalu pihak Kusuma Agro juga menggandeng/ mengajak kerjasama masyarakat yang berada di desa Toyomerto, dalam kegiatan produksi pupuk organik (pupuk kandang) berikut penuturan bapak Paulus Hari dalam kaitan proses kerjasama produksi pupuk kandang.

“ Kemudian Kusuma Agro juga menggandeng masyarakat desa Toyomerto dalam pembuatan pupuk kandang, jumlah penduduk di desa Toyometro sebanyak 300 kepala keluarga, dan jumlah sapiunya sekitar 800 ekor, sehingga produksi pupuk kandang berlebihan?, maka kita arahkan dan kita bina dahulu, “kelompok taninya Haji Soko”, mas. Saya sudah kesana dan pernah dikirim hasilny, dan ternyata hasilnya bagus juga”.

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bawasanya pihak Kusuma Agro memiliki program pemberdayaan bagi masyarakat setempat, melalui pembinaan masyarakat di desa Toyomerto dalam proses pembuatan pupuk kandang, program tersebut masih berjalan, tapi sekarang sudah tidak dibina lagi. Hal tersebut dikarenakan kelompok tani Haji Soko sudah dapat berjalan sendiri (sudah mampu memproduksi pupuk kandang sendiri, tanpa dibina oleh pihak Kusuma agro).

(2) Sebagai Penyandang Dana

Dalam peran sebagai penyandang dana, PT Kusuma Agrowisata tidak semerta-merta berupa nominal uang. Ini dikarenakan kebijakan dari manajemen yang mencoba melatih bentuk pemberdayaan agar dapat lebih mandiri. Sebagai kenyataan yang di peroleh dalam penelitian pada pemberdayaan dan pelatihan di klinik agrowisata yang tertera dalam surat kerjasama dengan pihak petani hortikultura, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pihak Kusuma Agrowisata hanya memberikan dan menyalurkan bantuan pembiayaan untuk kebutuhan sarana produksi dan atau peralatan sesuai tingkat kebutuhan,
- b. Semua bantuan pembiayaan yang di berikan pada kelompok tani mitra dalam bentuk barang atau peralatan, bukan dalam bentuk bantuan uang tunai,
- c. Seluruh penggunaan sarana produksi maupun peralatan yang diterima oleh kelompok tani mitra akan diperhitungkan nilainya atas dasar harga yang berlaku pada saat itu,
- d. Bantuan pembiayaan yang dilakukan pihak Kusuma Agrowisata kepada pihak kelompok petani hortikultura, selama pihak kelompok petani masih tercatat sebagai kelompok tani mitra binaan pihak Kusuma Agrowisata,
- e. Besarnya bantuan pembiayaan untuk keperluan sarana produksi sesuai dengan tingkat kebutuhan yang didasarkan atas luas areal tanam, jenis komoditi dan jadwal yang ditentukan oleh pihak Kusuma Agrowisata.

Dari data tertulis yang di dapatkan oleh peneliti bisa diartikan bahwa peran sebagai *partner* kerjasama satu sama lain berusaha untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang sama baiknya. Karena sesuai dengan tujuan kerjasama adalah mendapatkan hasil dan keuntungan dalam rupa apapun tanpa membuat satu sisi pihak merasa kerugian. Dan bila kerjasama ini perkembangannya sangat berpotensi maka sangat mungkin untuk terus dikembangkan di waktu-waktu berikutnya.

(3) Sebagai Pengguna Hasil Produksi

Berkaitan dengan Pengguna hasil produksi, industri dan kegiatan distribusi produk olahan yang dihasilkan, Kusuma Agrowisata memakai hasil beberapa produk olahan *home industri* masyarakat sekitar yang dijual pada stand-stand yang ada di dalam areal kusuma agro. Selain itu, hasil produksi yang sudah jadi dapat dipasarkan ke berbagai kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, diantaranya adalah : Sari apel, Sari strawbeery,

Sari jeruk, Sari sirsat, Cuka Apel, Jenang dan wingko Apel, kopi Arabika, serta sayur-sayuran hidroponik (Brokoli, bawang, sawi, dan kentang). Dari hasil olahan tersebut akan didistribusikan ke kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogjakarta, Malang, Kediri, hingga di Pulau Bali. Sarana pengangkutannya dengan menggunakan kendaraan cargo yang dimiliki oleh Kusuma Agrowisata dan cargo baik udara maupun laut.

Kemudian untuk penggunaan hasil produksi industri sari apel Kusuma Agro, pihak Kusuma Agrowisata juga mengambil bahan mentah berupa buah apel dari masyarakat sekitar, Berikut penuturan bapak Paulus Hari dalam kaitan proses kerjasama dengan masyarakat dalam Proses kegiatan penyuplaian bahan mentah dalam produksi sari apel.

“ 20% bahan baku pementan sari apel, diambil dari kebun, yang *greed A* dan *B* dipetik konsumen, kemudian *greed C* dan *creaal*, di masukan ke industri. Dalam satu bulan, masa *high season* industri sari apel Kusuma Agro, memerlukan 5000 Kg atau 5 ton, dan *low season* memerlukan 4000 Kg atau 4 ton, dan sisanya disuplai dari masyarakat sekitar, disuplai dari Bumiaji dan Junrejo, kebetulan kita mempunyai 6 *suplaiyer*, dan yang aktif 4 *suplaiyer* dan yang 2 jarang atau kadang-kadang setor ke kita”. (wawancara pada tanggal 30 Agustus 2008)

Dari data di atas dapat kita lihat bawasanya pihak Kusuma Agro membutuhkan sekitar 80% bahan mentah yang di suplai oleh masyarakat petani apel yang ada di Kecamatan Bimiaji dan Junrejo, dalam pemenuhan produksi sari apel Kusuma Agrowisata. Sebagai pengguna hasil produksi bahan mentah ataupun hasil jadi, secara langsung ataupun tidak Kusuma Agrowisata memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat Kota Batu pada umumnya dan masyarakat sekitar obyek wisata Kusuma Agrowisata pada khususnya.

3) Bentuk kegiatan kerjasama

Adapun bentuk kerjasama antara pihak Kusuma Agrowisata dengan pemerintah yaitu: Pihak Kusuma Agrowisata memberikan Pajak Daerah kepada Kelurahan sisir dan Ngaglik, kemudian untuk teknologi tanaman Hortikultura pihak Kusuma Agro bekerjasama dengan BPTPH (Badan Pertahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Jatim dan Dinas Pertanian. Untuk lebih jelasnya, dapat

kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Paulus Hari Sebagai Koordinator Klinik Kusuma Agrowisata.

“ Kita Bekerjasama dengan BPTPH dalam kegiatan pelatihan masyarakat, tentang teknologi pengembangan bio tanaman hidroponik mas !, kemudian kapan lalu kita juga bekerjasama dan ditunjuk oleh dinas Pertanian Jatim sebagai pilot proyek pengembangan tanaman Hidroponik mas.”(wawancara tanggal 23 Agustus 2008)

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Paulus Hari diatas, dapat kita ketahui bawasanya pihak Kusuma Agrowisata juga melakukan kerja sama dengan aparatur pemerintahan yang ada, antara lain; menyumbang PAD (Pendapatan Daerah) untuk kelurahan Sisir dan Ngaglik, kemudian berkerjasama dengan Badan Pertahanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPTPH), Dalam rangka memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang teknologi pengembangan tanaman sayuran hidroponik dan pernah menjadi *PILOT PROJECT* untuk Dinas Pertanian Jawa Timur, dalam rangka pengembangan tanaman hidroponik.

Disamping itu Juga dilakukan kerjasama dalam pelatihan pemberdayaan pada pegawai Dinas Pertanian Kota Batu. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Kusuma Agrowisata adalah dengan bentuk memberikan pelatihan-pelatihan yang di kelola oleh pihak Klinik Agrobisnis, hal ini sama seperti yang di kemukakan oleh bapak Paulus Hari selaku Koordinator klinik Kusuma Agrowisata:

“yah,..... memang pihak Kusuma Agrowisata memilki program pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan, yang dikelola oleh Klinik Agro Bisnis, misalnya pelatihan budidaya tanaman kopi, jeruk, apel, sayuran (khususnya hidroponik), dan sekarang mengarah ke budi daya *organik farming*”.

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bawasanya pihak Kusuma Agro memiliki program pemberdayaan bagi aparatur pemerintahan, memalui pelatihan-pelatihan budidaya tanaman kopi, jeruk, apel, sayuran hidroponik dan budidaya *organik farming* (kagiatan pertanian organik). Program kerjasama yang baru dalam kerjasama dengan institusi pemerintahan, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata lebih ditekankan pada

- a) Program Penelitian dan Pengembangan
 - (1) Agens Hayati
 - (2) Kompos
 - (a) Media Padat
 - (b) Media Cair
- b) Jasa Konsultasi Klinik Agrobisnis dan Agrowisata
 - (1) Pembuatan Rumah Kaca
 - (2) Setting Pertamanan
 - (3) Konsultasi Usaha Hortikultura
- c) Jasa Wisata Pertanian dan Perkebunan
- d) Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan SDM

c. Dampak kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin Kota Batu

1) Dampak terhadap peluang kerja

Kusuma Agro memiliki luas keseluruhan lahan seluas ± 16 Ha, dengan pembagian 8 Ha, untuk kebun apel, 4 Ha, untuk kebun jeruk 4 Ha, untuk kebun Strawberry dan Hotel. Data tersebut diperoleh dari hasil tanya-jawab yang dilakukan oleh penulis, dan dari hasil keterangan yang di berikan oleh *Guide* yang sedang memandu penulis dalam kegiatan penelitian selama berada di Kusuma Agrowisata.

Guide tersebut memberikan pernyataan sebagai berikut :

” Luas seluruh lahan Kusuma Agrowisata ini sekitar 16 Ha, mas, dengan pembagian areal, 8 Ha untuk kebun yang ditanami dengan tanaman Apel, 4 Ha untuk kebun yang ditanami tanaman Jeruk, dan 4 Ha untuk lahan yang dibuat kebun Strawberry dan Hotel”. (Keterangan Saudari, DWI, selaku guide yang memandu penulis dalam melakukan penelitian pada kebun Kusuma Agro, pada tanggal 25 Augustus 2008).

Dari keterangan diatas maka dapat kita lihat luas lahan yang dimiliki oleh pihak Kusuma Agrowisata yang harus dikelola, ± 16 Ha, dalam lahan seluas 16 Ha tentunya dibutuhkan suatu penanganan yang benar, dimana dari hasil pengelolaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pihak Kusuma Agrowisata, dalam mengelola lahan seluas 16 Ha, pihak Kusuma Agrowisata

mebutukan suatu cara atau sistem untuk mengelolanya, sehingga tujuan dari peningkatan keuntungan pun tercapai.

Dalam pemenuhan tujuan peningkatan keuntungan, Pihak Agro, harus melakukan kegiatan produksi yaitu dengan melakukan kegiatan produksi yang berupa jasa layanan wisata petik apel dan industri pembuatan produk mentah berupa buah apel dan jeruk menjadi produk jadi yang berupa sari apel, sari jeruk, cuka apel, dan lainnya. Berkaitan dengan proses produksi produk, Kusuma Agro memerlukan pekerja yang dapat menanganinya secara tepat, sehingga tercapailah hasil produksi barang yang baik. Disamping sistem atau cara yang bagus dalam kegiatan pengolahan produk-produknya, juga di perlukan kemampuan dari pekerja yang menanganinya, dalam hal ini tidak semata-mata orang yang berkerja pada satu bidang saja, tetapi meliputi keseluruhan pekerja yang ada, mulai dari atasan hingga pekerja lapangan, (mulai dari direktur hingga petani yang mengerjakan lahan secara langsung).

Dalam kegiatan mendistribusikan produk yang berupa sari apel, sari jeruk, jenang apel dan lainnya, pihak agro sudah memiliki pangsa pasar, hasil produksi/produknya akan di pasarkan atau di kirim ke kota-kota besar yang ada di pulau Jawa, seperti kota Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, hingga di Pulau Bali. Uraian ini juga di perkuat oleh penuturan dari Ibu Suyekti, yang memiliki usaha warung makanan yang berada di sekitar areal Kusuma agro. Dimana suami dari ibu Suyekti ini bekerja menjadi *driver* mobil yang menditribusikan produk dari Kusuma Agro ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali.

Penuturan dari Ibu Suyekti adalah sebagai berikut:

“...Suami saya berkerja menjadi *driver* di Kusuma Agro, dan biasanya mengirim barang berupa Sari apel, jenang apel dan sayur-sayuran, ke kota Kediri, Malang, Surabaya, Jogja, Bali dan Jakarta”.

Dari pernyataan yang diberikan oleh Bu Suyekti selaku warga Desa Sidorejo, dapat kita ketahui bahwa pihak Kusuma Agrowisata memperkerjakan penduduk sekitar obyek wisata dalam kegiatan distribusi barangnya,

Kusuma Agrowisata tidak hanya bergerak dalam bidang pariwisata tetapi juga memiliki usaha berupa industri yang mengolah hasil kebun yang berupa buah apel menjadi beberapa produk jadi, seperti sari apel, sari jeruk, sari sirsat, sari

strawberry, jenang apel dan cuka apel. Dalam kegiatan industri pengolahan sari apel, pihak Kusuma agro mendapatkan bahan baku dari kebunnya sendiri dan jika kekurangan mengambil dari masyarakat yang berada pada desa Punten. Bahan baku tersebut di ambil dari sisa-sisa panen dari kebun yang di panen pada musim itu, misalnya dari buah apel yang jatuh tanpa di petik, buah apel yang sudah di petik oleh wisatawan tetapi tidak jadi dibeli, serta buah apel yang kecil-kecl.

Dalam pemenuhan kegiatan produksi Industri, Kusuma Agro juga melibatkan penduduk sekitar, berikut wawancara dengan salah satu pekerja yang berada di Industri Kusuma agro, berkaitan dengan lama bekerja dan pendapatan yang diterima.

“ Saya sudah bekerja di Kusuma agro ini sejak tahun 2002 mas, saya berkerja di bagian pengepakan barang. Dan pada waktu itu saya mendapatkan gaji sebesar 15.000/ hari. Sekarang saya sudah mendapatkan gaji sebesar 23.000/ hari “.

(wawancara dengan mbak Eva, selaku pekerja kebun Kusuma Agowisata)

Dari kutipan wawancara di atas dapat kita lihat bahwa dalam bidang industripun pihak agro juga memerlukan tenaga kerja dari penduduk sekitar. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Mbak Widya yang bekerja di Kusuma Agrowisata menyatakan:

“Yaa..lumayan Mas, begitu lulus kuliah D1 saya langsung diterima bekerja disini. Meskipun gaji yang diterima..., ya lumayan lah pokoknya.”
(Keterangan Mbak Widya, sebagai Kasir di Kebun Kusuma Agro sejak 3 tahun yang lalu)

Kemudian dari kutipan penuturan yang diberikan oleh Bapak Ardy (seorang *staff roomboy* Hotel Kusuma Agro), yaitu:

“Wah.,kalau disini (di Kusuma Agro maksudnya) karyawan yang bekerja dari Desa Sisir saya kurang tahu pasti jumlahnya, tapi banyak juga kok., meskipun ada juga yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Kalau di Hotel ini sih tidak setiap hari banyak tamu (*sold out*), Cuma di hari-hari libur atau terdapat *event-event* tertentu saja yang tingkat hunian kamarnya penuh, misalnya ketika ada acara *wedding.*, management biasanya mengambil tenaga *casual* dari SMK Pariwisata Malang. Lumayan kan mereka masih sekolah ada tambahan uang jajan.”

Dari hasil kutipan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Kusuma Agro dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Dibawah ini akan dijelaskan dan di gambarkan data tenaga kerja Kusuma Agrowisata.

Tabel : 10
Data Tenaga Kerja Kusuma Agrowisata

JABATAN	JUMLAH KARYAWAN
General Manager	1 Orang
Oprasional Manager	1 Orang
Departement K.U.A	35 Orang
Departement B.T.T	16 Orang
Departement B.T.S	20 Orang
Departement K.A.A	14 Orang
Departement Marketing	16 Orang
Departement F&B dan Entertaim	25 Orang
Jumlah Karyawan	146 Orang

Sumber : PT. Kusuma Danastri Satria Wisata Jaya-Kusuma Agrowisata.

Dari data di atas dapat kita analisis bawasanya pihak Kusuma Agrowisata memiliki pekerja sebanyak 146 orang, dan di bagi menjadi; 1 Orang General Manager, 1 Orang Manager Oprasional, 35 Orang di Departement K.U.A, 16 Orang di Departement B.T.T, 20 Orang Di Departement B.T.S, 14 Orang di Departement K.A.A, 16 Orang di Departement Marketing, dan 25 Orang di Departement *Food and Baferage* (F&B) dan *Entertainment*. Dari 146 Orang yang bekerja pada Kusuma Agrowisata dapat di kategorikan/ dikelompokkan dalam 4 (empat), bentuk kelompok/ kategori.

Berikut dapat kita lihat tabel dan penjelasan dari penggolongan para pekerja tetap dan tidak termasuk karyawan harian lepas 3 Bulan, yang bekerja di Kusuma Agrowisata.

a) **Jumlah Karyawan Kusuma Agrowisata Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel : 11

Data Tenaga Kerja Kusuma Agrowisata Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
LAKI-LAKI	83 %
PEREMPUAN	17 %
TOTAL	100 %

Sumber : PT. Kusuma Danastri Satria Wisata Jaya-Kusuma Agrowisata

Dari tabel diatas dapat kita analisis dengan penjelasan bahwa jumlah karyawan di Kusuma Agrowisata, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sekitar 83%, dan sisanya berjenis kelamin perempuan sebesar 17%.

b) **Jumlah Karyawan Kusuma Agrowisata Berdasarkan Grade**

Tabel : 12

Data Tenaga Kerja Kusuma Agrowisata Berdasarkan Grade

Grade	Jumlah
Non Grade	2%
I	9%
II	15%
III	22%
IV	4%
V	5%
VI	1%
Kontrak 1 Tahun	8%
KHT	34%

Sumber : PT. Kusuma Danastri Satria Wisata Jaya-Kusuma Agrowisata

Dari data di atas dapat kita analisis dengan penjelasan bahwa jumlah karyawan di Kusuma Agrowisata, yang memiliki Non Grade sebanyak 2 %, Grade I: sebanyak 9 %, Grade II sebanyak 15 %, Grade III sbanyak 22 %, Grade IV Sebanyak 4 %, Grade V sebanyak 5 %, Grade VI sebanyak 1 %, sedangkan karyawan yang masih kontrak 1 tahun sebanyak 8 %, dan KHT Sebanyak 34 %.

c) **Jumlah Karyawan Kusuma Agrowisata Berdasarkan Pendidikan**

Tabel : 13

Data Tenaga Kerja Kusuma Agrowisata Berdasarkan Pendidikan.

Pendidikan	Jumlah
SD	21%
SLTP	24%
SLTA	38%
D1	4%
D2	1%
D3	3%
S1	9%

Sumber : PT. Kusuma Danastri Satria Wisata Jaya-Kusuma Agrowisata

Dari data di atas dapat kita analisis dengan penjelasan bahwa jumlah karyawan di Kusuma Agrowisata berdasarkan tingkat pendidikannya adalah, tamat SD, 21%, tamat SLTP, 24%, tamat SLTA, 38%, tamat D1, 4%, tamat D2, 1%, tamat D3, 3%, dan tamat S1, 9%.

d) **Jumlah Karyawan Kusuma Agrowisata Berdasarkan Umur**

Tabel : 14

Data Tenaga Kerja Kusuma Agrowisata Kota Batu Berdasarkan Umur.

Umur	Jumlah
20 - 30 Tahun	35%
31 - 41 Tahun	47%
41 - 51 Tahun	13%
51 - 55 Tahun	5%
56 - 60 Tahun	0%

Sumber : PT. Kusuma Danastri Satria Wisata Jaya-Kusuma Agrowisata

Dari data di atas dapat kita analisis dengan penjelasan bahwa jumlah karyawan di Kusuma Agrowisata berdasarkan tingkat Umur adalah, Karyawan yang berkerja dan berumur antara 20-30 Tahun, sebanyak 35%, berumur antara 31-41 Tahun, sebanyak 47%, berumur antara 41-51 Tahun, sebanyak 13%, berumur antara 51-55 Tahun, sebanyak 5%, berumur antara 56-60 Tahun, sebanyak 0%.

2) Dampak terhadap peluang usaha

Berkaitan dengan teori yang di jelaskan oleh Pitana, dampak pembangunan pariwisata pada suatu daerah, bisa dilihat secara nyata dari beberapa jenis usaha yang terdapat di dalam maupun sekitar areal Kusuma Agrowisata. Mulai dari stan tanaman hias yang berada di dalam Kebun Kusuma Agrowisata, stan–stan warung yang menjual makan, pangkalan ojek, hingga penjual keripik kentang yang berasal dari *home industri* milik masyarakat sekitar. (observasi lapangan oleh penulis).

Dengan adanya beberapa jenis usaha yang berada pada sekitar areal Kusuma Agrokusuma, merupakan suatu bukti bahwa dalam pengembangan Kusuma Agrowisata memberikan suatu peluang usaha bagi masyarakat dilingkungan sekitar obyek wisata Kusuma Agrowisata. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat yang berjualan tanaman hias yang berada di dalam areal kebun Kusuma. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

“saya tidak bekerja pada agrokusuma, mas dan di sini saya hanya menyewa stan dengan biaya sewa 650 ribu per bulan”.
(wawancara dengan Bapak Slamet, selaku pedagang bunga).

Kemudian wawancara yang ke dua di lakukan oleh penulis pada penjual tanaman hias yang berbeda stand. Hasil dari wawancara tersebut ialah sebagai berikut :

“ Saya menyewa stand ini dengan per bulannya sebesar 700.000,- di sini saya menjual berbagai macam tanaman antara lain Anggrek dengan harga 150 ribu, untuk yang jenis bonsai pohon seribu bintang harganya 230 ribu. Saya penduduk asli Puntenrimah saya belakangnya hotel Purnama.
(Sumber pedagang tanaman hias dan tidak brsedia menyebutkan nama).

Dari wawancara yang dilakukan penulis pada 2 orang pedagang tanaman hias yang berada didalam Agrokusuma dapat kita lihat bahwasanya pihak Agrokusuma juga bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam penyediaan peluang usaha yang berupa stand tanaman hias. Bentuk dari kerjasama tersebut pihak Agrokusuma menyediakan stand untuk berjualan tanaman hias bagi masyarakat kemudian kontribusi yang di berikan oleh penjual kepada pihak Agrokusuma ialah dengan membayar sewa stan tersebut pada tiap bulannya

dengan harga 650-800 ribu sesuai dengan lahan yang di sewa. Kemudian penjual tanaman hias tersebut memperoleh keuntungan dengan menjual tanamannya dengan harga Rp 75.000 hingga Rp 250.000, yang di jual kepada wisatawan Agrokusuma. Sehingga dari uraian di atas kita ketahui bahwa terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak Kusuma Agrowisata dengan penjual tanaman hias. Selain dari penyediaan stan tanaman hias, Kusuma agro juga membangun warung-warung yang terdapat di depan kawasan Kusuma Agro, tetapi warung yang dibangun oleh pihak Kusuma Agro tersebut tidak dikenakan biaya sewa pada masyarakat yang menempatnya. Berikut penuturan dari Ibu Suyekti selaku penjual makanan dan minuman yang menempati warung di depan Kusauma Agrowisata.

“ Saya menjalankan warung ini sudah lama sejak tahun 1990-an, sejak agro ini baru buka. Pada waktu itu penghasilan suami saya 1500 perhari dan sekarang sudah mencapai 900.000,-/bulan. Warung ini juga dibuatkan oleh pihak agro, mas, dan Agro *gak* meminta setoran”.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Suyekti dapat kita amati, Kusuma Agrowisata juga membantu masyarakat dalam keterkaitan penyediaan sarana/ tempat untuk berjualan disekitar Kawasan Kusuma Agrowisata.

Kemudian untuk kegiatan produksi industri sari apel Kusuma Agro, pihak Kusuma Agro wisata juga mengambil bahan mentah berupa buah apel dari masyarakat sekitar, Berikut penuturan bapak Paulus Hari dalam kaitan proses kerjasama dengan masyarakat dalam Proses kegiatan penyuplaian bahan mentah dalam produksi sari apel.

“...20% bahan baku pembuatan sari apel, diambil dari kebun, yang *greed* A dan B dipetik konsumen, kemudian *greed* C dan *creaal*, di masukan ke industri. Dalam satu bulan, masa *high season* industri sari apel Kusuma Agro, memerlukan 5000 Kg atau 5 ton, dan *low season* memerlukan 4000 Kg atau 4 ton, dan sisanya disuplai dari masyarakat sekitar, disuplai dari Bumiaji dan Junrejo, kebetulan kita mempunyai 6 *suplaiyer*, dan yang aktif 4 *suplaiyer* dan yang 2 jarang atau kadang-kadang setor ke kita”.

Dari data di atas dapat kita lihat bawasanya pihak Kusuma Agro membutuhkan sekitar 80% bahan mentah yang di suplai oleh masyarakat petani apel yang ada di Kecamatan Bimiaji dan Junrejo, dalam pemenuhan produksi sari apel Kusuma Agrowisata. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan kedua

belah pihak disamping kebutuhan Kusuma Agrowisata dalam pemenuhan bahan baku untuk produksi sari apel dan jenang apel dapat tercukupi, hasil sisa kebun yang bagus dapat dijual oleh petani dan sisanya yang *gread C* dan *Creal* dapat di jual kepada pihak Kusuma Agrowisata.

3) Dampak terhadap peningkatan pendapatan

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI telah menggariskan, bahwa pengembangan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata. Sehingga pengembangan wisata harus ditujukan pada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta dan tanggung jawab masyarakat setempat yang terpadu dengan upaya pemerintah (Daerah) dan dunia usaha yang relevan, dalam mengembangkan wisata maupun dalam pengolahan lingkungan hidup/ sumber daya alamnya.

Pariwisata kerakyatan pada hakekatnya adalah pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dimana pariwisata itu berkembang sehingga mempunyai dampak nyata terhadap ekonomi secara keseluruhan, sehingga diharapkan pada akhirnya akan tercipta suatu proses yang berkelanjutan.

Pada kesempatan kerjasama antar institusi ini telah berakibat pada peningkatan pendapatan dari masyarakat yang turut serta di dalamnya. Melalui program kerjasama pelatihan, pembelajaran dan pemberdayaan yang di kelola oleh pemerintah melalui pihak Kusuma Agrowisata terdapat data nyata yang di peroleh oleh penulis selama melakukan penelitian dan wawancara pada warga sekitar Kusuma Agrowisata yang tercatat pada kependudukan di Kelurahan Sisir, sebagai berikut.

“...Lumayan mas, ada peningkatan pendapatan dalam tiap bulannya setelah adanya program-program yang telah dilakukan oleh Kusuma Agrowisata. Terlebih lagi, setelah kita di berdayakan dan diturut sertakan dalam pemberdayaan tersebut. Bila pada tahun lalu (2006) pendapatan perbulan saya cuma Rp 400.000.- sampai Rp 500.000.- kini pendapatan pokok saya selama satu bulan mencapai Rp 815.000.- itu pun belum ditambah uang bonus dari perusahaan. (wawancara dengan bapak Roto)

Dari keterangan hasil wawancara dengan Bapak Roto selaku masyarakat yang terdata sebagai penduduk Kelurahan Sisir yang bekerja selaku staff pegawai

di Kusuma Agrowisata sebagai *Resepion Hotel*, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Karena pada waktu sebelumnya sebagai penduduk yang bisa dikatakan tidak jelas apa pekerjaannya penghasilan untuk menghidupi keluarga bisa di katakan tidak memenuhi standart. Dan dengan diangkatnya sebagai pegawai Kusuma Agrowisata kini penghasilannya bisa memenuhi kehidupan keluarga, walaupun tidak secara berlebihan.

B. Analisa dan Interpretasi Data

1. Upaya Pemerintah Kota Batu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batu melalui sektor pariwisata

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang sama-sama mendesak untuk ditangani secara bersamaan. Banyak kajian membuktikan bahwa meluasnya kemiskinan, cepat atau lambat akan meningkatkan ketidakmerataan dalam pendapatan, kesenjangan dalam distribusi aset, perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan pemilikan tanah, dan ujungnya akan meningkatkan kesenjangan absolut maupun relatif (McKay dalam Ariadi, Septi. 2006;71).

Dalam perkembangan penanggulangan kemiskinan yang jadi pemikiran pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah selama ini lebih terfokus pada program klasik yang terus mangacu pada pertumbuhan ekonomi, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain dengan memberikan bantuan dana IDT, JPS, PPK, Program Tukesra-Kukesra dan lain-lain. Pada kesempatan lain, Pemerintah Kota Batu memiliki kebijakan lain dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan upaya/ cara menjalin program kerjasama dengan institusi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kota Batu sadar akan potensi yang dimiliki daerahnya yaitu terletak pada, sektor pariwisata alam dan pertaniannya yang di dukung oleh sumber daya alam yang tersedia, disertai dengan pemberdayaan manusianya.

Konsep penanggulangan kemiskinan melalui pariwisata masih membutuhkan penajaman secara terus-menerus. Setiap konsep yang dikembangkan dapat efektif digunakan sebagai pegangan dalam penyusunan agenda tindakan apabila mengandung elemen berikut ini. *Pertama*, Ia harus

aplikatif, dalam arti mudah diterapkan di lapangan. *Kedua*, konsep tersebut juga akomodatif, dalam arti mampu merespon kebutuhan dan tuntutan kelompok masyarakat miskin sebagai pemangku kepentingan dan pemilik sumberdaya pariwisata. *Ketiga*, konsep program yang ditawarkan tersebut memiliki masa depan yang menguntungkan bagi produsen maupun konsumennya. *Keempat*, Konsep tersebut menjamin keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Implementasi konsep tersebut perlu diawali dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, konsisten dan berkelanjutan. Kita memahami benar bahwa selain terkait dengan banyak sektor dan lini, pariwisata juga rentan terhadap pengaruh eksternal, sehingga pengembangannya tidak dapat diserahkan pada satu pihak. Pengalaman di daerah lain bahkan di negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata sebagai motor pembangunan ekonomi maupun distributor sumberdaya ekonomi dan sosial sangat ditentukan oleh keterpaduan dan konsistensi para pemangku kepentingan memainkan peran-peran strateginya.

Supaya lebih mudah dijalankan, maka perlu disusun kebijakan yang didasarkan pada fakta empirik yang menunjukkan relevansi perkembangan kepariwisataan dengan pengurangan kemiskinan. Mengingat perkembangan dimensi-dimensi kemiskinan saat ini semakin kompleks, maka kebijakan yang didesain secara intuitif dan berdasarkan pendekatan makro menjadi tidak relevan dan efektif apabila kemudian diterjemahkan menjadi program-program aksi. Perlu dicatat bahwa konsep penanggulangan kemiskinan melalui pariwisata sangat menekankan mekanisme distribusi dan keadilan bagi kalangan masyarakat miskin sebagai basis pertimbangan dalam pengembangan pariwisata. Yang menjadi patokan bukanlah seberapa besar hasil yang diraih, tetapi siapa saja yang menikmatinya dan bagaimana mekanismenya. Oleh sebab itu pengalaman hidup kelompok masyarakat miskin yang terentaskan melalui pengembangan pariwisata dapat dijadikan masukan bagi segala rumusan tadi.

Semua itu tentu saja tidak dapat berjalan dengan sendirinya apabila tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai pengambil keputusan sekaligus fasilitator pengembangan pariwisata. Bennet dan Ashly, (1999; 57) dengan tegas mengingatkan bahwa “*A pro-poor strategy is only likely to be effective if the partner government is committed do*

it”/ “ Strategi yang berpihak pada orang miskin hanya dapat berlaku (berjalan) efektif jika ada kerjasama dari pemerintah”. Peringatan ini relevan bagi kita ketika menyaksikan komitmen pemerintah di berbagai daerah masih rendah terhadap upaya akselerasi penanggulangan kemiskinan melalui pariwisata.

2. Kerjasama Pemerintah Kota Batu dan Kusuma Agrowisata dalam penanggulangan kemiskinan

Dalam hubungan antar institusi tak lepas dari peranan sebuah kemitraan atau ikatan sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan mempunyai suatu tujuan dibalikny. Umumnya istilah kemitraan diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, dalam pasal 1 angka delapan menyatakan bahwa ”kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil atau usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Pola kemitraan yang berjalan di sektor pemerintahan dan swasta sebagai pemegang kendali pariwisata selama ini ada beberapa macam bentuk, dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi daerah disekitarnya. Strategi yang sangat penting adalah berupa pengembangan konsep *community based tourism* yang merupakan dasar dari *sustainable tourism development*. Konsep ini menegaskan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri. Sebagai penentu pembangunan, masyarakat akan mampu mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan dan mengurangi tingkat ketergantungan pada faktor-faktor eksternal.

Syarat-syarat lain yang diharapkan hadir adalah: *pertama*: program-program pelatihan harus dapat secara lebih praktis mendorong tumbuhnya wiraswastawan-wiraswatawan lokal yang lebih mampu bersaing. *kedua*: mendorong tumbuhnya *partnership*. Kemitraan tidak berarti dalam bentuk amal/kedermawanan yang justru akan memperlemah kemampuan masyarakat, namun dalam bentuk suatu ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinerjik. Beberapa kemitraan yang dapat dipertimbangkan adalah: (1)

Antar skala usaha (besar-kecil), (2) antar daerah antar kawasan, (3) antar sektor, (4) antar jenis usaha dan (5) pengembangan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan dari kemitraan diatas, semisal ide kemitraan antara hotel dengan pedagang kaki lima untuk perbaikan kualitas makanan yang di jual, ataupun pembinaan pengelolaan kebun dan pertanian oleh Klinik Kusuma Agrowisata. *Ketiga*, mendorong tumbuhnya kekuatan lokal untuk bersaing. Kekuatan pariwisata adalah keunikannya yang tidak dimiliki oleh pesaing. Oleh sebab itu memperkuat identitas setempat harus merupakan fokus utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan program dan strategi di atas sekaligus menegaskan kembali kepada sektor pariwisata sangat terkonsentrasi terhadap masyarakat kecil. Sudah tiba saatnya mereka juga dapat menjadi tuan rumah, dan bukan sekedar sebagai penonton.

Pariwisata memberikan sumbangan pada pengurangan kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan, peluang untuk meningkatkan pendapatan dan juga pengurangan akan kerentanan. Lebih khusus lagi, pariwisata bisa memberikan sumbangan secara efektif pada pembangunan secara berkesinambungan dan pengurangan kemiskinan dengan sejumlah cara khusus, termasuk diantaranya;

- a. Peluang baru khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pinggiran yang menarik pengunjung.
- b. Perluas kesempatan untuk penjualan barang dan jasa tambahan
- c. Pajak langsung dan penciptaan kegiatan ekonomi yang bisa dikenai pajak
- d. Penggunaan sumber daya yang bernilai dengan cara yang berkesinambungan melalui pariwisata berbasis masyarakat
- e. Peningkatan peluang rekreasi dan pengisian waktu luang bagi masyarakat miskin
- f. Peluang bisnis skala kecil dan intensif tenaga kerja yang lebih baik
- g. Mendorong persamaan jender didalam peluang kerja

Namun demikian, tantangan terletak pada kemampuan banyak aktor pariwisata untuk memastikan bahwa ada hubungan yang berkesinambungan

diantara daya tarik pariwisata utama dan sistem pendukung serta segmen-segmen layanan yang didukung masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang dapat memastikan bahwa kerjasama pariwisata skala kecil berbasis masyarakat terintegrasi dengan industri pariwisata yang konvensional.

Program semacam itu bisa meliputi penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, saluran telekomunikasi dan juga pelatihan keterampilan-keterampilan kepariwisataan untuk masyarakat. Keberhasilan dari kebijakan dan program pariwisata berbasis masyarakat didalam mengurangi kemiskinan tergantung pada kemampuan untuk menjadi inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat miskin dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan.

3. Dampak kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin Kota Batu

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh melibatkan masyarakat, sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat. (Pitana, 2005, 109).

Dengan adanya aktivitas pariwisata dalam bentuk obyek wisata yang berada pada suatu daerah, sedikit banyak akan memberikan dampak pada penyediaan lapangan pekerjaan, peluang usaha bagi masyarakat sekitar, pengurangan dampak lingkungan bagi penduduk miskin yang lebih rentan, pengurangan dampak sosial budaya pariwisata yang negatif bagi penduduk miskin, dan dampak pada peningkatan pendapatan pada masyarakat miskin. Hal tersebut di perkuat dengan teori dari Pitana (2005: 110) yang menerangkan bahwa; pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak, dan keuntungan badan usaha milik pemerintah dan sebagainya.

Berkaitan dengan teori yang dijelaskan oleh Pitana, dalam pembangunan pariwisata tentunya melibatkan masyarakat setempat, daerah yang dikembangkan potensi pariwisatanya tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat yang berkaitan

dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunannya. Menekankan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian yang relevan dari sektor pariwisata di level nasional dan lokal. Menyediakan dana untuk program-program pelatihan yang bisa mendukung keberhasilan dan persyaratan khusus proyek-proyek pariwisata berbasis masyarakat. Pelatihan ini akan memusatkan perhatian pada pelatihan pemandu wisata lokal, pengembangan akomodasi dan layanan tinggal dan keterampilan manajemen bisnis. Mengintensifkan keterlibatan bisnis perjalanan sektor swasta di dalam pelatihan terutama melalui program-program pengembangan.

Menurut Simon 1990 dalam Sedarmayati (2005: 22) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*, pemberdayaan adalah sebagai berikut: Pemberdayaan adalah suatu aktivitas reflektif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber, dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, maka Kusuma Agrowisata berusaha memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses pengembangan usahanya. Agrowisata adalah salah satu industri yang berbasis pada industri pertanian. Industri ini mengutamakan pada kemampuan petani untuk mengelola lahan pertanian menjadi pemasok produk-produk utama dalam bidang pertanian. Pengembangan bisnis ini tergantung pada luas lahan dan distribusi produknya. Untuk meningkatkan kemampuan petani, jumlah produksi, dan mekanisme distribusi, maka dibutuhkan peran serta pihak Agrokusuma dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan petani apel pada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Desa Sisir sebagai pemukiman yang berbatasan langsung dengan areal Kusuma Agrowisata.